

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN
PANGAN NON TUNAI (BPNT) PENERIMA MANFAAT
TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA MISKIN DI
KELURAHAN GLUGUR KOTA KECAMATAN MEDAN
BARAT**

SKRIPSI

Oleh :

HERI GUNAWAN

NPM 1503090020

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohiim

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **HERI GUNAWAN**
N.P.M : 1503090020
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) PENERIMA MANFAAT TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA MISKIN DI KELURAHAN GLUGUR KOTA KECAMATAN MEDAN BARAT**

Medan, 13 Maret 2019

Dosen/Pembimbing


Dr. AZAMRIS CHANRA, M.AP

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


H. MUJAHIDDIN S.Sos, M.SP

Dekan,



Dr. ARIEF SALEH, S.Sos, M.SP

PENGESAHAN

Bismillahirrohmanirrohiim

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **HERI GUNAWAN**
N P M : 1503090020
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Pada hari, tanggal : Rabu, 13 Maret 2019
W a k t u : Pukul 07.45 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP**
PENGUJI II : **H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP**
PENGUJI III : **Dr. AZAMRIS CHANRA M.AP**

(.....)
Arifin Saleh
(.....)
Mujahiddin
(.....)
Azamris Chanra

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Arifin Saleh
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP



Zulfa Hmi
Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya, Heri Gunawan, NPM 1503090020, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau plagiat, atau karya jilplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 13 Maret 2019

Yang menyatakan,



Heri Gunawan



Unggul, Cerdas, Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Heri Gunawan.
NPM : 1503090020
Jurusan : Ilmu Kesehatan Sosial.
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Penerima Manfaat Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	20/12/2018	Bimbingan Sistematis Penulisan Proposal.	
2	22/12/2018	Revisi Latar Belakang Masalah.	
3	27/12/2018	ACC. Proposal. untuk Seminar	
4	23/01/2019	Bimbingan Draft wawancara.	
5	29/01/2019	ACC. Draft wawancara.	
6	14/02/2019	Bimbingan Perbaikan Bab I, II, III	
7	28/02/2019	ACC. Bab. I, II, III	
8	06/03/2019	Kelengkapan skripsi. ACC Bab IV dan V, ACC untuk sidang Meja Hijau.	

Medan, 4 MARET 2019

Dekan,

(Dr. Arifan Saleh, S.Sos, M.S.P.)

Ketua Program Studi,

(H. Mazahidin, S.Sos, M.S.P.)

Pembimbing ke :

(Dr. Azamris Chandra, M.P.)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Penerima Manfaat Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat, untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Syamsudirman dan Ibunda yang kusayangi Sri Sayekti yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada peneliti. Oleh sebab itu, sudah selayaknya segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang tulus kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu, kepada yang terhormat :

1. Kepada Bapak Dr. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Kepada Bapak Dr. Arifin Saleh Siregar, S.Sos, M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Drs. Zulfahmi, M.I.Kom selaku wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Abrar Adhani S.Sos, M.I.Kom selaku wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Kepada Bapak H. Mujahiddin S.Sos, M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada Bapak Dr, Azamris Chanra, M.AP selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi dan masalah lainnya.
7. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada peneliti.
8. Kepada seluruh staff Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu memberikan informasi dan membantu dalam administrasi surat menyurat peneliti.
9. Kepada Abang ku Tisyar Bramantiyas ST dan Kakak ku Apriyarti Amd yang telah memberikan perhatian dan motivasi kepada peneliti.

10. Kepada Masyarakat Penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Glugur Kota yang bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
11. Kepada pihak Balitbang Kota Medan, dan Dinas Sosial Kota Medan yang telah memberikan izin penelitian.
12. Kepada Bapak Budiono SH selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Medan Barat yang juga bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
13. Kepada Kakanda Ayu Cahyati S,Sos selaku alumni Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu untuk memperkenalkan peneliti kepada masyarakat Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat.
14. Kepada tercinta Astri Suriyani yang membantu dan memberikan semangat motivasi kepada peneliti.
15. Kepada Sahabat peneliti (Ajran Afdholi Marbun, Yudhanto Dwi Andikha, Azka Ghilman dan Dendy Putra Riswanda).
16. Kepada teman-teman seperjuangan IKS A Pagi stambuk 2015.
17. Kepada Adik-Adik PK IMM FISIP UMSU Periode Amaliyah 2018-2019 yang tercinta.
18. Kepada Adik-Adik ku (Faridah Juliana, Arguanda Pribadi, Try Handika, Dzulqarnain Polem, Rasya Ivanka, Cici Nurparadilla, Aziz Rivai Harahap, Nuzul Lailika dan Nabila Yolanda Putri).

Akhir kata mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang tidak dapat peneliti sampaikan. Semoga doa, dan dukungan yang anda berikan kelak akan terbalaskan di masa depan yang penuh kebahagiaan kemudian hari. Aamiin Allahumma Aamiin.

Medan, Februari 2019

Peneliti

Heri Gunawan

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) PENERIMA MANFAAT TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA MISKIN DI KELURAHAN GLUGUR KOTA KECAMATAN MEDAN BARAT

**Heri Gunawan
1503090020**

Abstrak.

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal secara bersamaan disuatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Dengan demikian sangatlah penting adanya program-program pembangunan masyarakat yang berfokus kepada mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat khususnya masalah keluarga miskin. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang menarik untuk kajian taraf kesejahteraan. Keluarga miskin adalah kondisi ketidakberdayaan yang dialami masyarakat akibat ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan hidup maupun akibat ketidakmampuan negara dalam memberikan perlindungan sosial kepada keluarga miskin di perkotaan. Dengan demikian pemerintah membentuk dan menyelenggarakan program yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan memenuhi kesejahteraan rakyat dalam sektor ketahanan pangan yang dinamakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan rumusan masalah Bagaimana efektivitas pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) penerima manfaat terhadap kesejahteraan keluarga miskin di Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat ? dan memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai terhadap kesejahteraan keluarga miskin di Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, dan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Bapak Reynold Sianturi SE selaku pelaksana program di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, Bapak Budiono SH selaku tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, Ibu Darmitri, Nur Masitah, Hermita Fanti, Veni Ivanty dan Nuraini selaku masyarakat penerima manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Penerima Manfaat Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat dapat dikatakan berjalan efektif. Hal ini didasari dengan adanya pendataan dan survey yang merupakan bagian dari strategi program sehingga bantuan tersebut tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga masyarakat mendapatkan bantuan untuk terwujudnya kesejahteraan keluarga miskin dalam aspek tingkat pendapatan dan ketahanan pangan.

Kata Kunci : Efektivitas, Program BPNT, dan Kesejahteraan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II : URAIAN TEORITIS	8
2.1 Konsep Efektivitas	8
2.2 Konsep Kemiskinan	10
2.2.1 Pengertian Kemiskinan	10
2.2.2 Penyebab Kemiskinan	11
2.3 Konsep Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	15
2.4 Dasar Hukum Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	16
2.5 Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	18
2.6 Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	18
2.7 Prinsip Utama Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	19
2.8 Konsep Kesejahteraan	20

2.9 Konsep Kesejahteraan Keluarga	23
2.10 Tahapan Keluarga Sejahtera	24
BAB III : METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Kerangka Konsep	28
3.3 Defenisi Konsep	30
3.4 Kategorisasi Penelitian	30
3.5 Informan atau Narasumber	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data	32
3.7 Teknik Analisis Data	32
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian	34
3.9 Deskripsi Objek Penelitian	34
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
4.1 Hasil Penelitian	71
4.1.1 Deskripsi Data Narasumber	71
4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi	74
4.1.3 Analisis Hasil Wawancara	88
4.2 Pembahasan	90
BAB V : PENUTUP	96
5.1 Simpulan	96
5.2 Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN DOKUMENTASI

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 : Kategorisasi Penelitian	31
Tabel 4.1 : Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin	71
Tabel 4.2 : Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan	72
Tabel 4.3 : Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur	73
Tabel 4.4 : Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan	73

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 : Kerangka Konsep	29
Gambar 3.2 : Lokasi Dinas Sosial Kota Medan	35
Gambar 3.3 : Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Medan	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal secara bersamaan disuatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga juga merupakan bagian dari masyarakat, dan masyarakat salah satu pelaku pembangunan dan korban pembangunan, sehingga masyarakatlah yang paling merasakan dampak dari segala aspek program yang dilaksanakan. Dengan demikian sangatlah penting adanya program-program pembangunan masyarakat yang berfokus kepada mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat khususnya masalah keluarga miskin.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang menarik untuk kajian taraf kesejahteraan. Keluarga miskin adalah kondisi ketidakberdayaan yang dialami masyarakat akibat ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan hidup maupun akibat ketidakmampuan negara dalam memberikan perlindungan sosial kepada keluarga miskin di perkotaan. Dampak yang dirasakan pada keluarga miskin ialah kebutuhan ataupun ketahanan pangan sehari-hari dan ini adalah permasalahan yang bersifat secara kompleks di daerah perkotaan.

Dengan demikian masalah keluarga miskin adalah tugas setiap manusia dalam mengelola negara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Negara juga harus melahirkan suatu pondasi hukum atau dasar pemikiran yang nantinya akan menjadi pedoman untuk menjalankan program-program kepentingan rakyat.

Adapun pedoman pada negara Indonesia ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Terdapat pada sila ke-dua pancasila yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan di Pasal 27 ayat (2) juga dijelaskan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selain itu juga dijelaskan mengenai peran pemerintah yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum (Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia).

Dari pedoman tersebut juga terdapat turunan nya yakni berupa Undang-Undang. Apabila difokuskan pedoman tersebut di bidang melaksanakan kesejahteraan kehidupan bangsa, maka dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Bab IV pasal 19 mengenai penanggulangan kemiskinan. Mengatakan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Maka dari itu peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia dapat ditemukan di perkotaan dan pedesaan.

Masalah kemiskinan di perkotaan disebabkan kedudukan kota-kota dalam masyarakat negara tersusun dalam jaringan yang bertingkat-tingkat dan merupakan pusat-pusat penguasaan atau pendorinasian bagi pengaturan kesejahteraan, kehidupan masyarakat negara. Sistem pendorinasian yang

berpusat di kota-kota bukan hanya melibatkan aspek-aspek ekonomi, sosial, komunikasi dan ketahanan pangan. Tingkat kemiskinan rumah tangga di perkotaan dapat digambarkan dengan pendapatan dan pola pengeluarannya. Pendapatan yang rendah menyebabkan daya beli juga rendah sehingga rumah tangga miskin akan melakukan pilihan dalam membelanjakan pendapatannya bahkan mungkin harus meniadakan beberapa kebutuhan dasar lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar tertentu. Terkhusus di Kota Medan, persentase angka kemiskinan mengalami kenaikan dan penurunan dalam masa 4 tahun. Dapat dilihat berikut ini :

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Medan Tahun 2014 – 2017.

Tahun	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan(P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2014	9,12	1,33	0,28
2015	9,41	1,21	0,24
2016	9,30	1,51	0,43
2017	9,11	1,56	0,41

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Medan.

Dapat dilihat dari tabel tersebut persentase penduduk miskin di Kota Medan tertinggi pada tahun 2015, sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan. Permasalahan rumah tangga miskin di perkotaan sering terjadi di berbagai kelurahan. Dalam mengatasi kemiskinan tujuan utama negara kepada masyarakat ialah memberikan rasa kesejahteraan sosial kepada siapapun. Secara defenisi kesejahteraan ialah kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan

dasar bagi individu atau kelompok baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan.

Dengan demikian pemerintah membentuk dan menyelenggarakan program yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan memenuhi kesejahteraan rakyat dalam sektor ketahanan pangan yang dinamakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program BPNT adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per bulan, melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan ditempat yang telah bekerjasama dengan Bank Penyalur BPNT. Besaran BPNT adalah Rp 110.000/KPM/Bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai, dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan atau telur sesuai dengan kebutuhan di E-warong. Bantuan dapat disisakan dan terakumulasi dalam rekening Bantuan Program. Pemilikan komoditas beras dan atau telur dalam Program BPNT berdasarkan tujuan untuk menjaga kecukupan gizi KPM. Penambahan jenis komoditas untuk mencapai tujuan tersebut dapat ditentukan berdasarkan hasil-evaluasi. Program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif, dan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Untuk mendukung pelaksanaan program BPNT, maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Perpres RI Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Program ini dapat mampu

mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang seimbang kepada peserta KPM, meningkatkan kesejahteraan kehidupan KPM dan ketepatan sasaran atau waktu penerimaan. Program BPNT ini diasumsikan akan dapat mempengaruhi pola pengeluaran rumah tangga. Penyaluran kebutuhan pangan bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para rumah tangga penerima bantuan program dalam memenuhi kebutuhan pangan dan pola kesejahteraan nya.

Berkaitan dengan yang dijelaskan program BPNT tersebut, tingkat koordinasi dalam melakukan pelaksanaan di tingkat Kecamatan maka dilakukannya koordinasi oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan. Pelaksanaan di tingkat desa/kelurahan didukung oleh perangkat desa/kelurahan setempat dan Pendamping Program BPNT.

Untuk itu jika ditinjau dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) khususnya di Kecamatan Medan Barat memerlukan adanya kerjasama yang baik antara masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mensukseskan pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Maka dari itu Penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul : **“Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Penerima Manfaat Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah “Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Penerima Manfaat Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat ?.”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : “Untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Penerima Manfaat Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat”.

1.4 Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini, berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan adalah sebagai berikut :

Secara Teoritis : Untuk menambah wawasan keilmuan tentang penerapan teori keterkaitan pelaksanaan program bantuan pangan non tunai dengan kesejahteraan keluarga.

Secara Praktis : hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk membuka cakrawala berpikir bagi peneliti dan mengetahui tentang keberhasilan program bantuan pangan non tunai dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan pada skripsi ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada bab ini menjabarkan teori-teori efektivitas, kemiskinan, program bantuan pangan non tunai, kesejahteraan, dan kesejahteraan keluarga.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi penelitian, informan/narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian, deskripsi ringkas objek penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang di teliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Konsep Efektivitas

Efektivitas adalah suatu kosa kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu : “*efektive*” yang berarti berhasil, ditaati, mengesankan, mujarab, dan mujur. Dari sederetan arti diatas, maka yang paling tepat adalah berhasil dengan baik, jika seseorang dapat bekerja dengan baik maka ia dapat dikatakan bekerja secara efektif. Dalam pelaksanaan kerja selalu memakai lima macam sumber usaha. Yaitu pikiran, tenaga, waktu, uang dan benda. Walaupun dalam gabungan yang berbeda untuk masing-masing jenis pekerjaan, namun pada umumnya setiap orang dalam melakukan kegiatan tertentu menginginkan suatu hasil yang maksimal. Tetapi permasalahan efektivitas bukanlah sesederhana pengertian diatas, karena efektivitas itu menyangkut banyak hal, oleh karena itu para ahli memberikan defenisi yang beragam untuk menjelaskan apa arti batasan dari pengertian efektivitas itu.

Sumaryadi (2005:105), mengatakan bahwa efektivitas dalam organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah di capai. Adapun pendapat lain juga mengemukakan bahwa efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksananya Kurniawan (2005:105).

Gie (2007: 2) juga mengatakan bahwa efektivitas mengandung arti terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki. Jadi, perbuatan seseorang yang efektif ialah perbuatan yang menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki oleh setiap orang itu. Setiap pekerjaan yang efisien tentu juga berarti efektif, karena dilihat dari segi usaha hasil yang dikehendaki telah tercapai dan bahkan dengan penggunaan unsur minimal. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa efektivitas diidomkan sebagai mengerjakan hal yang tepat yaitu menjalankan aktivitas-aktivitas yang secara langsung membantu organisasi mencapai berbagai sasarannya. (Robbins P, 2010:8).

Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan proses dan waktu yang ditentukan maka dapat menghasilkan kebijakan yang baik dan inilah yang disebut dengan efektivitas. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah di tetapkan. Jika hasil kegiatan tepat sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya. Pelaksanaan kegiatan selalu memakai lima macam sumber usaha, yaitu pikiran, tenaga, waktu, uang dan benda. Walaupun dalam gabungan yang berbeda untuk masing-masing jenis kegiatan, namun pada umumnya setiap masyarakat dalam melakukan kegiatan tertentu menginginkan hasil yang maksimal. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya.

Jadi, berdasarkan pendapat dari para ahli di atas efektivitas juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan dan sesuai dengan sasarannya, untuk menghasilkan sejumlah barang

atau jasa kegiatan yang telah dijalankan. Begitu juga dengan pemerintah di Dinas Sosial Kota Medan dalam melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap capaian tujuan program yakni meningkatkan kesejahteraan keluarga. Khususnya kesejahteraan keluarga penerima manfaat di Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat Kota Medan.

2.2 Konsep Kemiskinan

2.2.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan secara etimologi berasal dari kata miskin yang berarti mengubah gaya dari sifat kepada satu keadaan (kata benda), kata miskin dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti tidak berharta, serba kekurangan (berpenghasilan rendah). Salah satu firman Allah SWT yang menerangkan kemiskinan juga tertera didalam Al-Quran yang berbunyi :

فَاتِذَا الْفَرِطَىٰ حَقَّهُ □ وَ الْمَسْكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ □ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah; dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S Ar-Rum : 38)

Kemiskinan biasanya didefenisikan sebagai sejauh mana suatu individu berada di bawah tingkat standar hidup minimal yang dapat diterima oleh masyarakat atau komunitas nya. Marianti dan Munawar dalam Maipita (2014: 9) berpendapat bahwa kemiskinan merupakan fenomena multidimensi didefenisikan

dan diukur dalam banyak cara. Dalam kasus, kemiskinan telah diukur dengan terminologi kesejahteraan ekonomi, seperti pendapatan dan konsumsi.

Menurut Niemietz dalam Maipita (2014: 9) menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk membeli barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, papan, dan obat-obatan.

Menurut Usman dalam Jamaluddin (2017: 236-237) mengatakan bahwa kemiskinan adalah kondisi kehilangan (*deprivation*) sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan serta hidup serba kekurangan. Sebagaimana Bank Dunia dan Chambers juga mengemukakan dalam Jamaluddin (2017: 236-237) kemiskinan sebagai ketidakmampuan masyarakat yang diukur dalam standar hidup tertentu, yang mengacu pada konsep miskin relatif yang melakukan analisis perbandingan di negara-negara kaya ataupun miskin. Konsep absolut dari kemiskinan adanya wabah kelaparan, ketidakmampuan untuk membesarkan atau mendidik anak, dan lain-lain.

Berdasarkan pandangan tersebut bahwa kemiskinan pada hakikatnya merupakan kebutuhan manusia yang tidak terbatas hanya pada persoalan ekonomi. Oleh karena itu, program pemberdayaan masyarakat miskin sebaiknya tidak hanya fokus pada dimensi pendekatan ekonomi saja, tetapi juga memerhatikan dimensi pendekatan lain, yaitu pendekatan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya sosial.

2.2.2 Penyebab Kemiskinan

Menurut Kartasmita dalam Jamaluddin, (2017: 237), mengatakan defenisi miskin berangkat dari penyebabnya, sebagai berikut :

- a. Rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Dalam bersaing untuk mendapatkan lapangan kerja yang ada, taraf pendidikan sangat menentukan. Taraf pendidikan yang rendah membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang.
- b. Rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir, dan prakarsa.
- c. Terbatasnya lapangan kerja. Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan dan kesehatan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan.
- d. Kondisi keterisolasian. Banyak penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

Keempat penyebab tersebut menunjukkan adanya lingkaran kemiskinan. Rumah tangga yang miskin pada umumnya berpendidikan rendah dan terpusat di

daerah pedesaan. Karena pendidikan rendah, produktivitasnya pun rendah sehingga imbalan yang diterima tidak cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan, yang diperlukan untuk dapat hidup dan bekerja. Akibat rumah tangga miskin menghasilkan keluarga-keluarga miskin pada generasi penerusnya. Kemiskinan dalam berbagai tampilan wajahnya telah memberikan dampak kepada perseorangan, keluarga dan lembaga. Akan tetapi, tidak dapat dimungkiri bahwa yang paling esensial adalah kemiskinan selalu bermula dari kondisi perseorangan, baik sebagai perseorangan, sebagai anggota lembaga keluarga, atau sebagai anggota dari sebuah lembaga tertentu.

Selain itu pendapat lain mengatakan bahwa menurut Sumodiningrat dalam Jamaluddin (2017: 247) penyebab kemiskinan di lihat dari bentuk kemiskinannya. Kemiskinan terdiri atas kemiskinan natural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural.

Kemiskinan kultural merupakan kondisi kemiskinan yang terjadi karena dari awalnya miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya pembangunan, mereka hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah.

Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor alamiah, seperti karena cacat, sakit, usia lanjut, atau bencana alam. Kondisi kemiskinan seperti ini disebut sebagai persisten poverty, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun-temurun.

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan upaya menanggulangi kemiskinan natural, yaitu dengan merencanakan bermacam-macam program dan kebijakan, tetapi karena pelaksanaannya tidak seimbang, pemilikan sumber daya tidak merata. Kesempatan yang tidak sama menyebabkan keikutsertaan masyarakat menjadi tidak merata pula sehingga menimbulkan struktur masyarakat yang timpang.

Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekadar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Bappenas (2004) mendefenisikan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut, antara lainnya terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari pelakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Dapat disimpulkan dalam artian sempit, bahwa kemiskinan adalah permasalahan sosial yang terjadi secara kompleks di suatu negara sedang berkembang, salah satunya di Indonesia. Kemiskinan dapat terjadi di pedesaan dan perkotaan. Khususnya masalah kemiskinan di perkotaan yakni Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Kemiskinan di perkotaan akan berdampak terasa pada masyarakat miskin yang tertinggal di daerah desa/kelurahan. Salah satu penyebab

kemiskinan ialah pendapatan rendah, pendapatan masyarakat atau keluarga yang rendah sangat mempengaruhi kesejahteraan kehidupan dari segi pemenuhan kebutuhan pangan. Maka salah satu upaya pemerintah daerah kota Medan dalam menanggulangi kemiskinan yaitu ikut serta dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) demi terpenuhinya kebutuhan pangan untuk keluarga yang tergolong miskin di Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.

2.3 Konsep Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan inklusif, Presiden Republik Indonesia memberikan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Keuangan inklusif tanggal 26 April 2016. Penyaluran bantuan sosial non tunai dengan menggunakan sistem perbankan dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan.

Lebih lanjut, Ratas tentang penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi tanggal 16 Maret 2016 memberikan arahan bahwa mulai Tahun Anggaran 2017 penyaluran Beras Sejahtera agar dilakukan melalui kupon elektronik (e-voucher) sehingga tepat sasaran dan lebih mudah dipantau. E-voucher ini digunakan oleh penerima manfaat untuk membeli beras serta bahan pangan bergizi, sesuai jumlah dan kualitas yang diinginkan.

Dengan demikian, tujuan Program Bantuan Pangan secara non tunai adalah untuk meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, memberikan gizi yang lebih seimbang, lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin, mendorong usaha eceran rakyat, memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin, dan mengefektifkan anggaran. Dalam jangka panjang, penyaluran bantuan pangan secara non tunai diharapkan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat.

Penyaluran bantuan pangan secara non tunai mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di seluruh daerah perkotaan maupun pedesaan di Indonesia. Subsidi rastra juga dialihkan menjadi bantuan sosial. Dengan demikian bantuan pangan akan disalurkan ke masing – masing Kabupaten/Kota dalam bentuk non tunai atau natura, yaitu tetap dalam bentuk beras. Sebagian kabupaten yang sarana dan prasarana penyaluran non tunainya belum memadai, tetap menyalurkan Rastra namun tanpa harga tebus yang harus dibayarkan Keluarga Penerima Manfaat.

2.4 Dasar Hukum Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Adapun Dasar Hukumnya ialah :

- a. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017** tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- b. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016** tentang strategi Nasional Keuangan Inklusif.
- c. **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015** tentang Belanja Bantuan Sosial pada kementerian Negara/Lembaga.

- d. **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016** tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada kementerian Negara/Lembaga.
- e. **Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017** tentang Program Keluarga Harapan.

Pada dasarnya, penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai diharapkan memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat melalui akses yang lebih luas terhadap pelayanan keuangan. Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH/ pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan Bank Himbara. Bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 110.000, yang ditransfer setiap bulannya melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik atau disebut dengan Kartu Kombo. Dengan adanya KKS, peserta KPM dapat membeli kebutuhan pangan seperti (beras, gula, tepung, minyak goreng dan lainnya) melalui agen yang tersedia di beberapa lokasi tertentu.

Program BPNT adalah upaya pemerintah guna membantu mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Melalui program tersebut diharapkan dapat

memberikan manfaat yang nyata dalam perubahan pola pengeluaran rumah tangga yaitu dengan peningkatan konsumsi pangan maupun non pangan rumah tangga. Salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah kebijakan beras untuk keluarga miskin. Subsidi bahan pangan kepada penduduk miskin akan meningkatkan kesejahteraan penerima subsidi.

Program BPNT ini diasumsikan akan dapat mempengaruhi pola pengeluaran rumah tangga. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para rumah tangga penerima bantuan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

2.5 Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Program Bantuan Pangan Non Tunai memiliki tujuan, yakni :

- a. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
- b. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM.
- c. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM.
- d. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- e. Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

2.6 Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Adapun manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai, yaitu :

- a. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- b. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.
- c. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).
- d. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

2.7 Prinsip Utama Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Adapun prinsip utama dari Program Bantuan Pangan Non Tunai yakni :

- a. Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM.
- b. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, berapa, jenis, kualitas, dan harga bahan pangan (beras/dan atau telur) serta tempat membeli sesuai dengan preferensi (tidak diarahkan pada E-warong tertentu dan bahan pangan tidak dipaketkan).
- c. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM.
- d. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM.
- e. E-warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber sehingga terdapat ruang alternatif pasokan yang lebih optimal.
- f. Bank penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, program bantuan pangan non tunai merupakan program upaya pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan keluarga penerima manfaat bantuan dan guna memenuhi kebutuhan pangan setiap bulannya. Program bantuan pangan non tunai mulai diselenggarakan oleh pemerintah pada tahun 2017, dapat dikatakan program terbaru setelah program keluarga harapan. Dalam menjalankan program agar tercapainya tujuan dari program tersebut, maka peran dari setiap pihak yang terkait dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai adanya koordinasi yang baik, sistem pendataan yang terperinci, dan proses penyaluran berjalan dengan semestinya. Adapun lembaga yang terkait dalam melaksanakan program bantuan pangan non tunai di Kota Medan sendiri ialah Dinas Sosial Kota Medan bagian bidang penanggulangan fakir miskin.

2.8 Konsep Kesejahteraan

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (Kamus Besar Bahasa Indonesia), dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide

negara sejahtera. Al-Quran juga membahas mengenai tentang kesejahteraan, tertera pada Al - Quran, yang berbunyi :

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى (١١٧) إِنَّ لَكَ
أَلًا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ (١١٨) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ (١١٩)

Artinya : 117. Maka, Kami berfirman: "Wahai Adam sesungguhnya Iblis ini musuh bagimu dan bagi isterimu; oleh itu, janganlah ia menyebabkan kamu berdua keluar dari Syurga, kerana dengan yang demikian engkau (dan isterimu) akan menderita. 118. "Sesungguhnya telah dikurniakan berbagai nikmat bagimu, bahawa engkau tidak akan lapar dalam Syurga itu dan tidak akan bertelanjang. 119. "Dan sesungguhnya engkau juga tidak akan dahaga dalam Syurga itu, dan tidak akan merasa panas matahari". (QS. Thâhâ/20:117-119)

Dari ayat menurut ini jelas bahwa pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang, dan kepanasan semuanya telah terpenuhi di sana. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur pertama dan utama kesejahteraan sosial.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya,

masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Menurut Sumarti kesejahteraan merupakan kondisi relatif yang dibentuk masyarakat melalui interaksi sosial. Pendefinisian kesejahteraan tersebut didasarkan pada stratifikasi sosial dalam masyarakat. Ketika suatu golongan menempati posisi dominan dalam masyarakat maka definisi kesejahteraan lebih berorientasi pada golongan status tersebut.

Menurut BPS dalam Iskandar (2012 : 116) kesejahteraan berkaitan dengan kebutuhan dasar. Jika kebutuhan bagi setiap individu atau keluarga tidak terpenuhi, dapat dikatakan tingkat kesejahteraan dari individu atau keluarga tersebut belum tercapai. Sedangkan pandangan menurut Lee dan Hanna mendefinisikan kesejahteraan sebagai total dari *net worth* (manfaat yang benar-benar diperoleh) dan *human capital Wealth* (kesejahteraan sumber daya manusia). Manfaat yang diperoleh merupakan nilai atas *asset* yang dimiliki dikurangi pengeluaran (liabilitas), sedangkan kesejahteraan SDM (*human capital income*) yang ada saat ini, atau dihitung dari penilaian pendapatan non *asset* (Sjafari, 2014 : 46).

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Definisi-definisi di atas mengandung pengertian bahwa kesejahteraan sosial mencakup berbagai usaha yang dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia manusia, baik itu di bidang fisik, mental, emosional, sosial, ekonomi dan spiritual.

2.9 Konsep Kesejahteraan Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, di hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan (Sugeng, 2010:19).

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar keluarga dengan dengan masyarakat dan lingkungan”. (BKKBN).

Sajogyo dalam Iskandar (2012: 30) mendefenisikan kesejahteraan keluarga sebagai penjabaran delapan jalur pemerataan dalam Trilogi Pembangunan sejak Repelita III, yaitu : peluang berusaha, peluang bekerja, tingkat pendapatan, tingkat pangan, sandang, dan perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan, peran serta, pemerataan antardaerah, desa atau kota, kesamaan dalam hukum.

Menurut Iskandar (2012: 30) mendefenisikan kesejahteraan keluarga sebagai usaha untuk melepaskan diri dari segala tekanan, kesulitan, kesukaran dan gangguan untuk mencapai suatu keadaan yang relatif tercukupi. Kondisi tersebut dapat diraih apabila keluarga memiliki dan mengakses hal-hal seperti pekerjaan, pendapatan, kebiasaan menggunakan pangan, KB, pendidikan, kondisi fisiology, dan lingkungan tempat tinggal.

2.10 Tahapan Keluarga Sejahtera

Menurut BKKBN dalam Jamaludin, (2017: 244-246) penahapan keluarga sejahtera dibagi menjadi lima tahap, yaitu :

- a. Keluarga Pra-Sejahtera (sangat miskin).
- b. Keluarga Sejahtera I (miskin).
- c. Keluarga Sejahtera II.
- d. Keluarga Sejahtera III
- e. Keluarga Sejahtera III plus.

a. Tahapan Pra-Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu indikator tahapan Keluarga Sejahtera I. Tahapan Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang baru dapat memenuhi indikator berikut :

- 1) anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
- 2) anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
- 3) rumah yang ditempati mempunyai atap, lantai, dinding yang baik.
- 4) apabila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.

5) apabila pasangan usia subur ingin ber-KB, mereka pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.

6) semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

b. Tahapan Keluarga Sejahtera II adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi indikator Tahapan Keluarga Sejahtera I, indikator nya ditambah sebagai berikut:

1) anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

2) paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.

3) seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu pasang pakaian baru dalam setahun.

4) luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah.

5) tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.

6) ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.

7) seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin.

8) pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.

c. Tahapan Keluarga Sejahtera III adalah keluarga yang sudah memenuhi indikator Tahapan Keluarga Sejahtera I dan Indikator Keluarga Sejahtera II dan ditambah indikator berikut :

1) keluarga berupa meningkatkan pengetahuan agama.

- 2) sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang dan barang.
- 3) kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
- 4) ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
- 5) memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv.

d. Tahapan Keluarga Sejahtera III plus adalah keluarga yang memenuhi indikator Tahapan keluarga Sejahtera I, Indikator Keluarga Sejahtera II, dan Indikator Keluarga Sejahtera III dan ditambah indikator berikut :

- 1) secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan material untuk kegiatan sosial.
- 2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong J Lexy, (2017: 4) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik.

Menurut Strauss dan Corbin dalam Sujarweni (2014:6) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial dan lain-lain.

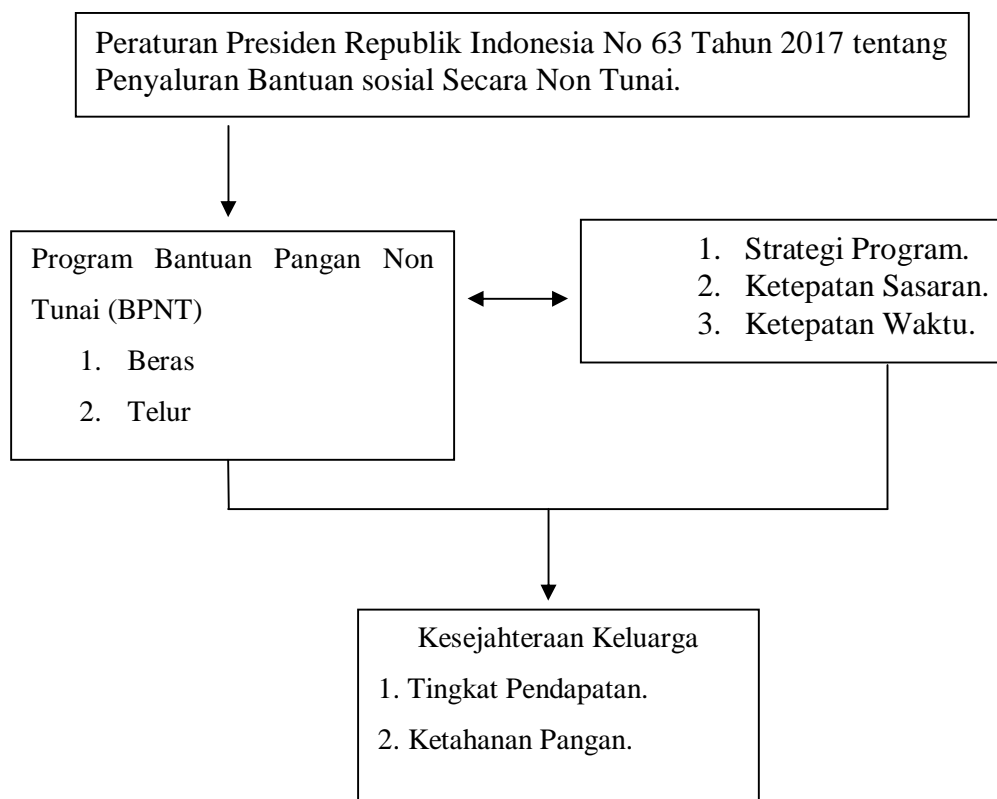
Denzin dan Lincoln dalam Moleong J Lexy, (2017: 5) juga menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari segi pengertian ini, masih tetap mempersoalkan latar alamiah dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena dan yang dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif adalah berbagai macam metode penelitian. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Jelas bahwa pengertian ini mempertentangkan penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif yaitu dengan menonjolkan bahwa usaha kuantifikasi apapun tidak perlu digunakan pada penelitian kualitatif.

3.2 Kerangka Konsep

Mantra (2004) Kerangka pemikiran dapat berbentuk uraian kualitatif, model matematis, diagram atau persamaan-persamaan yang langsung berkaitan dengan bidang ilmu yang di teliti.

Gambar 3.1 Kerangka Konsep



Dari gambar kerangka konsep diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2017 Presiden Republik Indonesia menetapkan suatu peraturan mengenai penyaluran bantuan sosial secara non tunai, dengan adanya peraturan presiden sebagai berikut maka pemerintah Indonesia menyelenggarakan suatu program yang menjadi turunan dari Peraturan Presiden tersebut, yakni bernama Program Bantuan Pangan Non Tunai. Dengan dilaksanakannya program bantuan pangan non tunai pada tahun 2017 maka ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan seperti strategi program, ketepatan sasaran, dan ketetapan waktu. Demi mewujudkan salah satu tujuan program bantuan pangan non tunai yaitu memberikan kesejahteraan keluarga. Aspek dari kesejahteraan keluarga dapat diukur dari tingkat pendapatan dan kebutuhan pangan.

3.3 Defenisi Konsep

Untuk memperjelas dan menyederhanakan beberapa konsep uraian teoritis dalam penelitian, maka peneliti menyederhanakan beberapa konsep tersebut sebagai berikut :

3.3.1 Efektivitas adalah suatu keadaan yang menggambarkan sejauh mana perencanaan pelaksanaan program dalam mencapai tujuan program. Dapat dikatakan efektivitas ialah suatu capaian atau keberhasilan dalam melaksanakan program demi tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan tingkat sarannya, untuk menghasilkan sebuah produk yang diciptakan dalam kegiatan yang dilaksanakan.

3.3.2 Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah program pemerintah yang di susun pada tahun 2017, yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Pemerintah daerah Kota Medan untuk melaksanakan program BPNT ialah Dinas Sosial Kota Medan.

3.3.3 Kesejahteraan adalah suatu keadaan atau terpenuhinya kebutuhan pokok dan kebutuhan khusus baik individu, maupun keluarga. Penerima Manfaat adalah Keluarga yang terdata menerima manfaat program.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Adapun kategorisasi penelitian dari Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Medan Barat adalah :

Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian

No	Kategorisasi	Indikator
1.	Program Bantuan Pangan Non Tunai	Strategi Program Ketepatan Sasaran Ketepatan Waktu
2.	Kesejahteraan Keluarga	Tingkat Pendapatan Ketahanan Pangan

Sumber : Penelitian tahun 2019 di Dinas Sosial Kota Medan dan Kelurahan
Glugur Kota Kecamatan Medan Barat.

3.5 Informan atau Narasumber

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi informan atau narasumber berjumlah 7 orang terdiri dari :

- 1) Reynold Sianturi SE selaku Pelaksana Program Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin di Dinas Sosial Kota Medan.
- 2) Budiono SH selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Medan Barat.
- 3) Darmitri selaku masyarakat penerima manfaat Program BPNT.
- 4) Nur Masitah selaku masyarakat penerima manfaat Program BPNT.
- 5) Hermita Fanti selaku masyarakat penerima manfaat Program BPNT.

- 6) Veny Ivanti selaku masyarakat penerima manfaat Program BPNT.
- 7) Nur'aini selaku masyarakat penerima manfaat Program BPNT.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua bagi, yakni data primer dan data sekunder.

Data Primer : Sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti melalui wawancara.

Data Sekunder : Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Seperti dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.

Dengan demikian teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi (gabungan) yaitu Observasi, Wawancara, dan Studi Dokumentasi.

3.7 Teknik Analisis Data.

Menurut Mudjiarahardjo, Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab (Sujarweni, 2014: 34).

Analisis data bertujuan untuk mendeskripsikan data, maupun untuk menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data dengan alur tahapan sebagai berikut : Reduksi Data, Penyajian Data, Penyimpulan dan Verifikasi, dan Kesimpulan Akhir.

Reduksi Data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh di reduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtiarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan. (Sujawerni, 2014:35).

Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya. (Sujawerni, 2014:35).

Penyimpulan dan Verifikasi.

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah reduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin

tegad dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota (Sujawerni, 2014:35).

Kesimpulan Akhir.

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai (Sujarweni, 2014:36).

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian.

Penelitian ini berlangsung pada Bulan Februari selama 14 Hari. Penelitian ini dilaksanakan di Lingkungan Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat Kota Medan. Hal ini didasari bahwa telah dilaksanakan Program Pemerintah yakni Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan di Dinas Sosial Kota Medan selaku penyelenggara program tersebut.

3.9 Deskripsi Objek Penelitian.

Dinas Sosial Kota Medan adalah salah satu perangkat daerah Kota Medan yang bertugas di Bidang Sosial. Memiliki kantor yang beralamatkan di Jl.Pinang Baris / Jl. TB Simaputang (Terminal Belakang) No. 114 Medan. Dinas Sosial juga mempunyai 3 bidang dan 9 seksi. Yang di pimpin oleh Bapak Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Kota Medan. Adapun struktur organisasi Dinas Sosial Kota Medan yaitu :

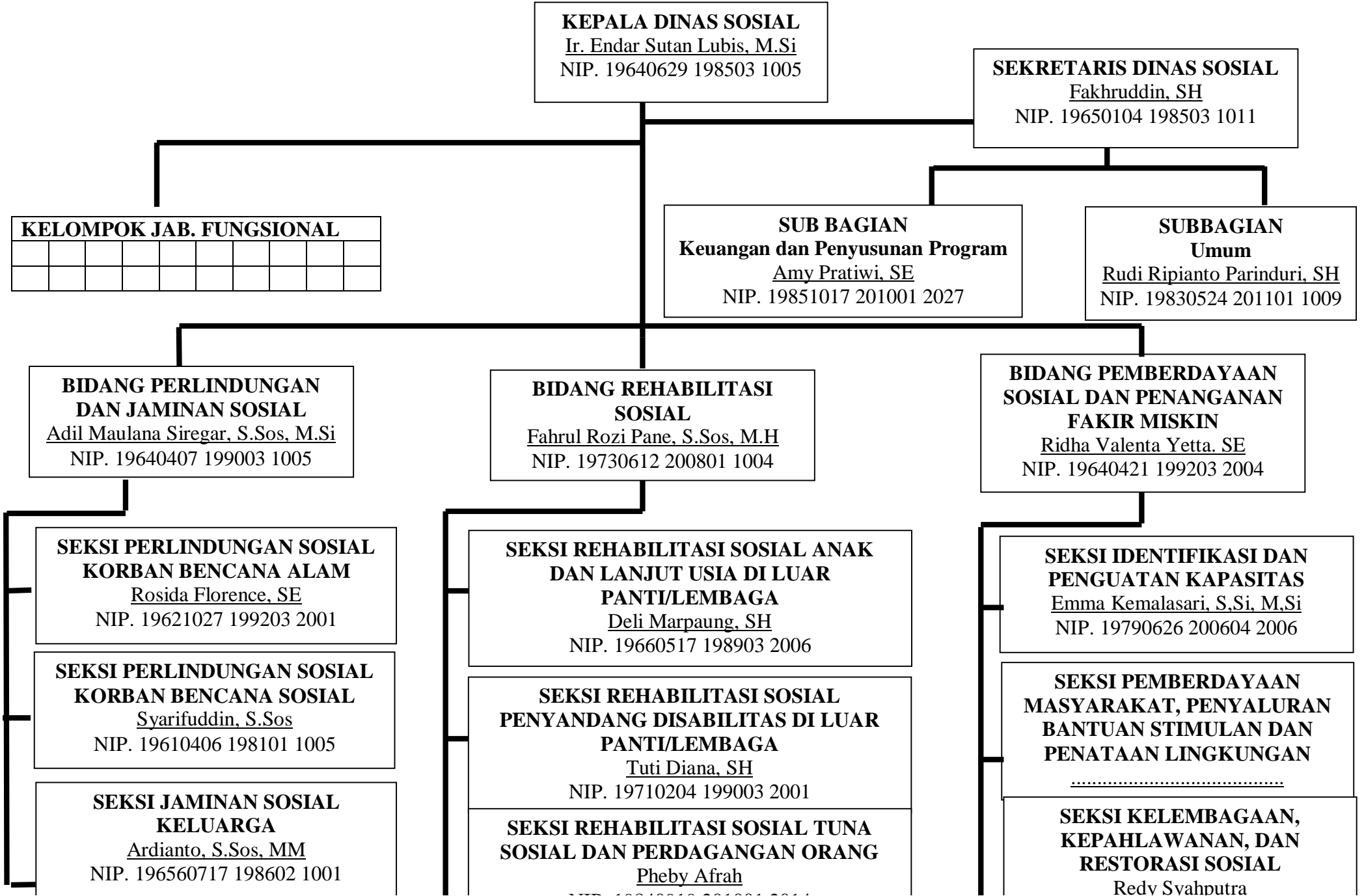
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, terdiri dari Subbagian Keuangan Penyusunan Program dan Subbagian Umum.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, dan Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Di Luar Panti/Lembaga, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Di Luar Panti/Lembaga, dan Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terdiri dari Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan, dan Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan, dan Restorasi Sosial.

Gambar 3.2

Lokasi Dinas Sosial Kota Medan



Gambar 3.3
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Medan



Adapun tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Dinas.
- b. Sekretaris mempunyai fungsi yakni :
 - 1) perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - 2) pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - 3) pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - 4) pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja,

- evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
- 5) fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Bidang yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - 6) pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
 - 7) pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
 - 8) pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - 9) pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - 10) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan

- 11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Sub Bagian Umum.

- a. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum.
- b. Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi, yakni :
 - 1) perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - 2) penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - 3) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - 4) penyusunan bahan pengoordinasian standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
 - 5) penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian,

analisa peraturan, penataan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan;

- 6) penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- 7) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Umum yang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
- 8) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- 9) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program

- a. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan program.
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi, yakni :
 - 1) perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana

- strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- 2) penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - 3) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - 4) penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan, meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - 5) penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
 - 6) pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas;
 - 7) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan

tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- 8) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- 9) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial

- a. Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup perlindungan dan jaminan sosial.
- b. Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi, yakni :
 - 1) perencanaan program dan kegiatan Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - 2) pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - 3) pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and*

punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- 4) pelaksanaan proses rekomendasi ataupun legalitas terkait pelayanan administrasi lingkup Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
- 5) pengoordinasian, pembinaan, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 6) pelaksanaan kebijakan dan pedoman standar teknis serta sosialisasi dalam rangka perlindungan, pemulihan, dan reintegrasi sosial korban bencana alam ataupun korban bencana sosial, orang terlantar, pemberian jaminan, dan bantuan sosial;
- 7) penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring, dan evaluasi kegiatan pelayanan jaminan sosial keluarga serta sinkronisasi dan integrasi penanganan Program Keluarga Harapan (PKH);
- 8) pelaksanaan kemitraan dalam pengelolaan logistik, bagi korban bencana alam;
- 9) pengoordinasian kegiatan lintas sektoral dalam menyelenggarakan sosialisasi terhadap standar operasional dalam pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi serta melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH);
- 10) pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan data fakir miskin dan data PMKS serta pemutakhiran data secara berkelanjutan;

- 11) pengoordinasian dan penyelenggaraan kerja sama kemitraan dengan *Migran CARE* dan Lembaga Sosial terkait kegiatan perlindungan sosial dan peningkatan jaminan sosial bagi keluarga Migran di bawah binaan imigrasi;
- 12) penyelenggaraan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam ataupun korban bencana alam;
- 13) pengoordinasian penyelenggaraan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
- 14) pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pelatihan bagi tenaga perlindungan dalam rangka pendampingan dalam penyaluran jaminan dan bantuan sosial;
- 15) pengoordinasian terkait mengembangkan peran serta masyarakat dalam perlindungan, pemulihan, reintegrasi sosial, serta pemberian bantuan sosial;
- 16) pelaksanaan analisis dan kajian atas perkembangan kebijakan perundang-undangan di Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial dengan bekerja sama lintas sektoral dengan instansi terkait untuk harmonisasi kebijakan antar daerah Kabupaten/Kota; dan ataupun dengan Provinsi;
- 17) pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan

unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- 18) pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- 19) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- 20) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.

- a. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial lingkup perlindungan sosial korban bencana alam.
- b. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam menyelenggarakan fungsi, yakni :
 - 1) perencanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - 2) penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - 3) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and*

punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- 4) penyusunan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan bimbingan teknis, serta memfasilitasi kegiatan pelatihan terkait perlindungan sosial dalam penanggulangan bencana alam;
- 5) penyusunan bahan analisis dalam rangka pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dalam bentuk pelatihan dan keterampilan sebagai wujud perlindungan bagi korban bencana alam;
- 6) penyusunan bahan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial korban bencana alam, kerja sama dan pengelolaan logistik bencana dan dapur umum;
- 7) penyusunan bahan pengoordinasian dan pembinaan Taruna Siaga Bencana (tagana) dalam rangka kesiapsiagaan penanggulangan korban bencana alam baik secara materil maupun moril dan psikososial;
- 8) penyusunan bahan pengoordinasian kegiatan lintas sektoral dalam rangka pemulihan dan penguatan sosial bagi korban bencana alam;
- 9) penyusunan bahan pengoordinasian dengan instansi terkait dengan lintas Kabupaten/Kota dalam pengelolaan logistik dan posko bencana, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam;

- 10) penyusunan bahan pelaksanaan analisis terhadap penyiapan sarana dan prasarana penampungan sementara korban bencana alam yang humanis dan mengakomodir nilai-nilai kearifan budaya lokal di Daerah;
- 11) penyusunan dan pengidentifikasian permasalahan dan hambatan dalam pengembangan sarana dan prasarana penampungan sementara bagi korban bencana alam sebagai bahan masukan bagi atasan dan pengumpulan data untuk instansi;
- 12) penyusunan bahan publikasi dan penyebarluasan informasi data hasil penanganan korban bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial;
- 13) penyusunan bahan pengoordinasian dalam penghimpunan *database* terkait data dan informasi hasil pemulihan sosial dan penguatan sosial bagi korban bencana alam;
- 14) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- 15) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

16) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial; dan

17) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

a. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial lingkup perlindungan sosial korban bencana sosial.

b. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial menyelenggarakan fungsi, yakni :

1) perencanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

2) penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

3) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- 4) penyusunan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan bimbingan teknis serta memfasilitasi kegiatan pelatihan dan pemberdayaan wirausaha sebagai wujud penanggulangan dan pengelolaan bencana berbasis masyarakat;
- 5) penyusunan bahan analisis dalam rangka pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dalam bentuk pelatihan dan keterampilan sebagai wujud perlindungan bagi korban bencana sosial bermasalah dan pemulangan orang terlantar;
- 6) pengoordinasian kegiatan lintas sektoral dalam rangka pemulihan dan penguatan sosial serta re-integrasi sosial bagi korban bencana sosial serta sinkronisasi dan integrasi penanganan Program Keluarga Harapan (PKH);
- 7) pengoordinasian dengan instansi terkait dan dengan lintas Kabupaten/Kota dalam pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma serta re-integrasi sosial bagi korban bencana sosial;
- 8) penyusunan bimbingan teknis dan pengoordinasian failitasi pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi anak dan lansia terlantar sebagai upaya peningkatan pemulihan trauma sosial dan pemeliharaan kesetiakawanan sosial serta wujud kepedulian sosial Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang sosial;

- 9) penyusunan bahan pengidentifikasian permasalahan dan hambatan dalam pengembangan sarana penampungan Rumah Singgah dan pelayanan perlindungan sosial bagi korban bencana sosial;
- 10) penyusunan bahan publikasi dan penyebarluasan informasi data hasil penanganan korban bencana sosial serta re-integrasi sosial serta melakukan koordinasi kegiatan dengan lembaga terkait;
- 11) penyusunan bahan pengoordinasian dalam penghimpunan *database* terkait data dan informasi hasil pemulihan sosial dan re-integrasi sosial bagi korban bencana sosial;
- 12) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- 13) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- 14) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial; dan
- 15) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Jaminan Sosial Keluarga

- a. Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial lingkup jaminan sosial keluarga.
- b. Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga menyelenggarakan fungsi, yakni :
 - 1) perencanaan program dan kegiatan Seksi Jaminan Sosial Keluarga dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - 2) penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Jaminan Sosial Keluarga untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - 3) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Jaminan Sosial Keluarga berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - 4) penyusunan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan bimbingan teknis serta memfasilitasi kegiatan terkait penyelenggaraan jaminan sosial keluarga bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit

kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan secara sosial dan ekonomi;

- 5) penyusunan bahan verifikasi dan fasilitasi penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sehat (KKS), dan Kartu Perlindungan Sosial (KPS);
- 6) penyusunan bahan analisis dalam rangka pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis perlindungan dan penyelenggaraan jaminan sosial keluarga serta monitoring penyelenggaraan asuransi sosial keluarga di Daerah dan bekerja sama dalam penyelenggaraan Badan Amil Zakat Daerah;
- 7) penyusunan bahan pengoordinasian kegiatan dengan Lembaga Pengelola Asuransi Sosial dan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Keluarga;
- 8) penyusunan bahan pengoordinasian instansi terkait dengan lintas Kabupaten/Kota dalam pemberian bantuan jaminan sosial terhadap korban tindak kekerasan, pelanggaran hak azasi manusia, pekerja migran terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan secara sosila dan ekonomi untuk memperoleh asuransi jaminan sosial;
- 9) penyusunan bahan pengidentifikasian permasalahan dan hambatan dalam pemantauan penyelenggaraan Jaminan Sosial Keluarga serta

merumuskan usulan prioritas tindak lanjut penanganan permasalahan yang ada beserta rumusan usulan dalam menangani hambatan dan permasalahan;

10) penyusunan bahan publikasi dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan dan pelayanan Jaminan Sosial Keluarga secara berkesinambungan;

11) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Jaminan Sosial Keluarga meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

12) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

13) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial; dan

14) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial terkait dengan tugas dan fungsinya.

8. Bidang Rehabilitasi Sosial

a. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di lingkup rehabilitasi sosial.

b. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi, yakni :

- 1) perencanaan program dan kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- 2) pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Rehabilitasi Sosial untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- 3) pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Rehabilitasi Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- 4) pengoordinasian penerbitan rekomendasi untuk rehabilitasi bagi penyandang disabilitas dan korban penyalahgunaan Napza;
- 5) pembinaan pengembangan serta pengendalian usaha-usaha pelayanan di Bidang Rehabilitasi Sosial gelandangan dan pengemis, wanita tuna susila, eks narapidana, waria, dan korban tindak kekerasan;
- 6) pengoordinasian pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Kota untuk dipulangkan ke daerah asalnya;
- 7) pengoordinasian pelaksanaan bimbingan terhadap usaha-usaha kesejahteraan sosial di Bidang Rehabilitasi Sosial;
- 8) pengoordinasian kerja sama dan kemitraan dengan instansi/lembaga atau pihak ketiga di Bidang Rehabilitasi Sosial;

- 9) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Rehabilitasi Sosial meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
 - 10) penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
 - 11) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
9. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga.
- a. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial lingkup rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga.
 - b. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga menyelenggarakan fungsi, yakni :
 - 1) perencanaan program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga dengan

- mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- 2) penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - 3) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - 4) penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan, pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap anak balita, anak nakal, anak jalanan, anak terlantar, dan anak berhadapan dengan hukum dan lanjut usia;
 - 5) penyusunan bahan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan dan penanganan khusus serta pengembangan kelembagaan;
 - 6) pengidentifikasian dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi, dan bimbingan lanjut dan sumber daya;
 - 7) penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi penerbitan rekomendasi untuk rehabilitasi bagi penyandang disabilitas dan korban penyalahgunaan napza;

- 8) penyusunan bahan pelaksanaan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) dan peringatan Hari Lanjut Usia (HALU);
- 9) penyusunan bahan pelaksanaan analisis dan penyiapan sarana serta prasarana rumah singgah sebagai upaya perlindungan sosial dalam rangka pemeliharaan anak-anak dan lansia terlantar;
- 10) penyusunan bahan penyelenggaraan kerja sama dan kemitraan dengan *Migran CARE* dan lembaga sosial terkait kegiatan perlindungan sosial dan peningkatan jaminan sosial bagi keluarga Migran di bawah binaan imigrasi;
- 11) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- 12) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- 13) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial; dan
- 14) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial terkait dengan tugas dan fungsinya.

10. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga.

a. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Luar Panti dan/atau Lembaga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial lingkup rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga.

b. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga menyelenggarakan fungsi, yakni :

- 1) perencanaan program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- 2) penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- 3) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- 4) penyusunan bahan pembinaan dan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas meliputi disabilitas fisik, mental, sensorik,

- intelektual, ganda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) penyusunan bahan pelaksanaan peringatan hari penyandang disabilitas internasional;
 - 6) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - 7) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - 8) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial; dan
 - 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial terkait dengan tugas dan fungsinya.

11. Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Dan Korban Perdagangan Orang

- a. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial lingkup rehabilitasi sosial, tuna sosial, dan korban perdagangan orang.
- b. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Dan Korban Perdagangan Orang menyelenggarakan fungsi, yakni :

- 1) perencanaan program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Dan Korban Perdagangan Orang dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- 2) penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Dan Korban Perdagangan Orang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- 3) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Dan Korban Perdagangan Orang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- 4) penyusunan bahan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, dan eks tuna sosial;
- 5) penyusunan bahan kegiatan rehabilitasi dan pelayanan sosial meliputi gelandangan dan pengemis, pekerja seks komersial, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna sosial lainnya, orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
- 6) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Dan Korban Perdagangan Orang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan

kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- 7) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- 8) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial; dan
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial terkait dengan tugas dan fungsinya.

12. Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin

- a. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- b. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi, yakni :
 - 1) perencanaan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - 2) pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

- 3) pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- 4) pengoordinasian penanganan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3)
- 5) pengoordinasian kegiatan pembinaan dan pengembangan kelembagaan sosial;
- 6) pengoordinasian pembinaan, pengendalian, dan pengembangan kelembagaan sosial;
- 7) pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan;
- 8) pelaksanaan penghimpunan data, menyiapkan dan menyusun bahan kebijakan serta melaksanakan usaha pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan;
- 9) pelaksanaan menyiapkan bahan untuk melestarikan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan serta pemeliharaan taman makam pahlawan;
- 10) pelaksanaan proses rekomendasi perizinan terhadap organisasi sosial yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial;
- 11) pelaksanaan bimbingan dan pengawasan karang taruna;

- 12) pemberdayaan lembaga sosial, peran keluarga, dan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
- 13) pembinaan terhadap potensi sosial dan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat
- 14) pengawasan dan pemberian rekomendasi terhadap pengajuan perizinan undian sosial, pengumpulan dana sosial baik berupa uang maupun berupa barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 15) pelaksanaan kebijakan dan pembinaan pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial, dan relawan sosial lainnya;
- 16) pelaksanaan kebijakan dan pembinaan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga sosial;
- 17) pelaksanaan penyelenggaraan pendataan data fakir miskin dan PMKS serta pengelolaan pemutakhiran data secara berkelanjutan untuk cakupan daerah kota;
- 18) pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- 19) pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- 20) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- 21) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

13. Seksi Identifikasi Dan Penguatan Kapasitas.

- a. Kepala Seksi Identifikasi Dan Penguatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin lingkup identifikasi dan penguatan kapasitas.
- b. Kepala Seksi Identifikasi Dan Penguatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi, yakni :
 - 1) perencanaan program dan kegiatan Seksi Identifikasi Dan Penguatan Kapasitas dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - 2) penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Identifikasi Dan Penguatan Kapasitas untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - 3) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Identifikasi Dan Penguatan Kapasitas berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- 4) penyusunan bahan pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kota;
- 5) penyusunan bahan pembinaan lingkup pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 6) penyusunan bahan pembinaan dan pelaksanaan penguatan kapasitas lingkup pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 7) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Identifikasi Dan Penguatan Kapasitas meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- 8) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- 9) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin; dan
- 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin terkait dengan tugas dan fungsinya.

14. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, Dan Penataan Lingkungan.
 - a. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, Dan Penataan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin lingkup pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan, dan penataan lingkungan.
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, Dan Penataan Lingkungan menyelenggarakan fungsi, yakni :
 - 1) perencanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, Dan Penataan Lingkungan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - 2) penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, Dan Penataan Lingkungan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - 3) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, Dan Penataan Lingkungan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- 4) Penyusunan bahan pelaksanaan sosialisasi tentang peran Dunia Usaha dalam UKS (Usaha Kesejahteraan Sosial) melalui dana CSR (Corporate Social Responsibility);
- 5) penyusunan pengoordinasian dan optimalisasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) sebagai Bank Data;
- 6) penyusunan bahan pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian izin terhadap semua kegiatan pengumpulan uang dan barang (PUB);
- 7) penyusunan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan Undian Gratis Berhadiah (UGB);
- 8) penyusunan bahan pelaksanaan verifikasi terhadap usulan/proposal dana hibah/bansos non tunai;
- 9) penyusunan bahan penanganan fakir miskin lingkungan perkotaan, pesisir, pinggiran, dan daerah perbatasan antar kota;
- 10) penyusunan bahan pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) fakir miskin;
- 11) penyusunan bahan rehabilitasi rumah tidak layak huni, perbaikan sarana lingkungan bagi warga miskin, fasilitasi dan koordinasi raskin, dan pembinaan kelompok usaha bersama fakir miskin;
- 12) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, Dan Penataan Lingkungan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan

unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

13) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

14) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin; dan

15) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin terkait dengan tugas dan fungsinya.

15. Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan, Dan Restorasi Sosial

a. Kepala Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan, Dan Restorasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin lingkup kelembagaan, kepahlawanan, dan restorasi sosial.

b. Kepala Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan, Dan Restorasi Sosial menyelenggarakan fungsi, yakni :

1) perencanaan program dan kegiatan Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan, Dan Restorasi Sosial dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

- 2) penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan, Dan Restorasi Sosial untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- 3) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan, Dan Restorasi Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- 4) penyusunan bahan pembinaan terhadap Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Lembaga konsultasi keluarga (LK3), Karang Taruna, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan (TKSK);
- 5) pengumpulan dan pengolahan data lingkup Kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.
- 6) pembinaan terhadap Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).
- 7) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan Pembinaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM).
- 8) penyusunan bahan pelaksana koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan upaya pembinaan jiwa kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- 9) penyusunan bahan pelaksana pembinaan, pelestarian, nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan, dan kesetiakawanan sosial sesuai dengan urusan pemerintahan daerah;

- 10) penyusunan bahan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan veteran, pengembalian atau pemulihan tempat dan gedung bersejarah;
- 11) penyusunan bahan pelaksanaan pengolaan taman makam pahlawan skala kota;
- 12) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan, Dan Restorasi Sosial meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- 13) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- 14) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin; dan
- 15) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data Narasumber

Berdasarkan peneliitian yang telah dilaksanakan, maka data yang diperoleh dari narasumber melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka selanjutnya akan di kelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan. Apabila di kelompokkan berdasarkan jenis kelamin, maka jenis kelamin dari narasumber terbagi menjadi dua yaitu laki-laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 berikut akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori.

Tabel 4.1
Distribusi Narasumber berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentasi
1.	Laki-Laki	2	28,57%
2.	Perempuan	5	71,42%
Jumlah		7	99,99%

Sumber : Hasil Penelitian, Tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.1 diatas maka dapat dilihat bahwa narasumber dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi 2 orang sebesar 28,57%, sedangkan untuk narasumber perempuan sebanyak 5 orang dengan jumlah frekuensi 71,42%. Dengan demikian, yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 5 orang. Yang menjadi narasumber dalam penelitian ini lebih dominan perempuan.

Tabel 4.2
Distribusi Narasumber berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Presentasi
1.	S1	2	28,57%
2.	SMK	1	14,28%
3.	SMP	2	28,57%
4.	SD	2	28,57%
Jumlah		7	99,99%

Sumber : Hasil Penelitian, Tahun 2019

Berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh narasumber, maka dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu S1, SMK, SMP, dan SD. Pada tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah narasumber pada penelitian ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda yaitu S1 ada sebanyak 2 orang dengan jumlah 28,57%, SMK ada sebanyak 1 orang dengan jumlah 14,28%, SMP ada sebanyak 2 orang dengan jumlah 28,57%, dan SD ada sebanyak 2 orang dengan jumlah 28,57%.

Pada penelitian ini, pembagian kelompok umur narasumber dibagi menjadi 4 bagian, yakni umur 31-35 tahun, umur 36-40 tahun, umur 41-45 tahun, 46-50 tahun. Berikut akan dijelaskan pada tabel 4.3 sesuai kategori nya :

Tabel 4.3
Distribusi Narasumber berdasarkan Umur

No	Umur	Frekuensi	Presentasi
1.	31-35 tahun	1	14,28%
2.	36-40 tahun	2	28,57%
3.	41-45 tahun	1	14,28%
4.	46-50 tahun	3	42,85%
Jumlah		7	99,98%

Sumber : Hasil Penelitian, Tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dilihat bahwa narasumber dikelompokkan menjadi empat kelompok umur, yang memiliki umur 31-35 tahun sebanyak 1 orang dengan jumlah 14,28%, umur 36-40 tahun sebanyak 2 orang dengan jumlah 28,57%, umur 41-45 tahun sebanyak 1 orang dengan jumlah 14,28%, umur 46-50 tahun sebanyak 3 orang dengan jumlah 42,85%.

Tabel 4.4
Distribusi Narasumber berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Frekuensi	Presentasi
1.	ASN	1	14,28%
2.	Ibu Rumah Tangga	5	71,42%
3.	Relawan Sosial	1	14,28%
Jumlah		7	99,98%

Sumber : Hasil Penelitian, Tahun 2019

Berdasarkan pada tabel 4.4 diatas dilihat bahwa mayoritas dalam penyebaran wawancara kepada narasumber yang memiliki pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga sebanyak 5 orang dengan jumlah 71,42%, tingkat pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 1 orang dengan jumlah 14,28%, dan tingkat pekerjaan Relawan Sosial (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan/TKSK) sebanyak 1 orang dengan jumlah 14,28%.

4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat merupakan salah satu kelurahan di Kotamadya Medan yang menerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program BPNT diselenggarakan dari pemerintah dan diberikan kepada masyarakat merupakan Program terbaru dari Pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tahun 2017. Sebelum dikenal dengan nama Program BPNT dahulu program ini sering dikenal masyarakat sebagai Program Raskin (Beras Miskin). Namun berganti nama menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan konsep yang lebih modern.

Sistem yang digunakan pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) agar tersalurkan dengan baik kepada masyarakat yakni menggunakan sistem kartu kombo atau sering disebut dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bagi masyarakat yang sudah berhasil melalui tahapan verifikasi data maupun validasi data. Dengan adanya Kartu Keluarga Sejahtera para penerima manfaat bantuan tersebut akan mendapatkan saldo rekening sebesar Rp. 110.000/bulan. Saldo tersebut akan dicairkan kepada agent brilink untuk menukarkan saldo tersebut dengan kebutuhan pokok pangan seperti beras dan telur.

Secara terperinci, peneliti akan menjabarkan hasil wawancara dari narasumber yang terkait dengan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sesuai dengan kategorisasi penelitian :

1) Strategi Program

Strategi adalah cara atau usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menjalankan wewenang dan mencapai tujuan dari program BPNT. Usaha tersebut membutuhkan kerjasama antara Dinas Sosial Kota Medan, Pemerintah Kecamatan/Kelurahan yang terkait dan masyarakat yang terdaftar sebagai penerima Bantuan tersebut. Program BPNT ini dilakukan dengan menyelenggarakan beberapa sosialisasi-sosialisasi ke masyarakat bahwa Program Pemerintah Pusat mampu mengatasi beban masyarakat dan sangat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga miskin. Selain itu usaha yang dilakukan juga berbentuk pendataan, survey dan melakukan dokumentasi berupa foto rumah masyarakat agar bantuan BPNT tersebut dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Reynold Sianturi, SE selaku menjabat sebagai pelaksana program di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, pada tanggal 08 Februari 2019, pukul 10.00 WIB, bahwa salah satu strategi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan adalah melaksanakan sosialisasi kepada keluarga penerima manfaat dan calon keluarga penerima manfaat bersama-sama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan petugas pendamping BPNT agar masyarakat mengetahui dan memahami mengenai tujuan Program BPNT ini yang disalurkan dari Pemerintah Pusat

melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Untuk selanjutnya ketika proses sosialisasi dan pendataan terselesaikan, kami juga melakukan survey secara fisik ke rumah-rumah warga untuk mendokumentasi kan foto bentuk rumah. Biasanya kami mendokumentasi kan foto rumah hadap depan, belakang, samping, dalam dan luar. Dari hasil survey tersebut, data akan kami kirimkan ke pusat yakni kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Hal senada juga di sampaikan oleh Bapak Budiono SH selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Medan Barat, pada tanggal 16 Februari 2019 pukul 13.30 WIB, bahwa pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai sudah berjalan sejak tahun 2017 dan upaya yang kami lakukan berupa pendataan kepada tiap-tiap warga, untuk warga yang ingin terdaftar sebagai penerima manfaat seperti halnya warga menyerahkan berkas seperti Kartu Keluarga, KTP, dan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Ibu Darmitri selaku masyarakat pada tanggal 07 Februari 2019 pukul 16.00 WIB selaku penerima Program BPNT di Kelurahan Glugur Kota, mengatakan bahwa pendataan kepada masyarakat sudah berlangsung dengan baik, para petugas datang ke kami dan meminta data seperti Kartu Keluarga dan KTP. Selanjutnya petugas memfotokan kondisi fisik rumah kami. Beliau juga menyebutkan besaran bantuan dari Program BPNT ini yakni Rp, 110.000/bulan dan nantinya akan ditukarkan ke E-warong untuk mendapatkan beras dan telur.

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Nur Masitah selaku penerima Program BPNT di Kelurahan Glugur Kota pada tanggal 09 Februari 2019 pukul

16.45 WIB, mengatakan bahwa pendataan di lingkungan 10 menurut saya berjalan dengan baik, petugas memberikan arahan kepada kami untuk mengumpulkan data kami berupa Kartu Keluarga dan KTP agar masyarakat mendapatkan bantuan beras dan telur. Serta memberikan penyuluhan mengenai program BPNT ini. Beliau juga menyebutkan besaran bantuan dari Program BPNT ini yakni Rp, 110.000/bulan dan nantinya akan ditukarkan untuk mendapatkan beras dan telur.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Hermita Fanti pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 15.25 WIB selaku penerima Program BPNT di Kelurahan Glugur Kota, beliau juga menyampaikan hal yang sama, yakni sebelum mendapatkan bantuan BPNT, kami dimintain berkas-berkas oleh petugas. Data yang diminta berupa fotocopy kartu keluarga, KTP, untuk selanjutnya bentuk rumah nya juga di foto oleh petugas. Dan beliau juga menyampaikan bahwa dirinya merasa terbantu dengan dilaksanakannya serta di salurkan nya bantuan BPNT oleh pemerintah kepada masyarakat yang tidak mampu. Beliau juga menyebutkan besaran bantuan dari Program BPNT ini yakni Rp, 110.000/bulan, dengan jumlah uang tersebut dapat bantuan berupa beras, telur dan pernah mendapatkan gula.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Veni Ivanty pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 16.10 WIB selaku penerima Program BPNT di Kelurahan Glugur Kota, beliau juga menyampaikan awal pendataan yang dilaksanakan petugas kepada nya sejak pada tahun 2015, petugas datang menghampiri ibu dan di arahkan untuk menyerahkan data berupa kartu keluarga, KTP dan diwawancarain mengenai perekonomian keluarga. Petugas nya juga memberikan

semacam sosialisasi mengenai konsep Program Keluarga Harapan pada awalnya, untuk program BPNT nya pada tahun 2017. Menurut beliau dengan adanya bantuan tersebut merasa terbantu dan sejahtera. Beliau juga menyebutkan besaran bantuan dari Program BPNT ini yakni Rp, 110.000/bulan.

Hasil wawancara dengan Ibu Nur'aini pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 14.55 WIB selaku penerima Program BPNT di Kelurahan Glugur Kota juga menyatakan hal yang sama, kami menyerahkan berkas berupa data-data KTP, Fotokopi Kartu Keluarga. Beliau menyampaikan besaran bantuan yang didapatkan dari BPNT ini yaitu beras dengan jumlah 8kg sampai dengan 9kg dan mendapatkan telur sebanyak 10 butir sampai dengan 20 butir.

2) Ketepatan Sasaran

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Reynold Sianturi SE pada tanggal 08 Februari 2019 pukul 10.00 WIB selaku pelaksana Dinas Sosial Kota Medan, beliau mengatakan Program BPNT ini sudah tepat sasaran, karena hal ini didasari dengan adanya data dari Badan Pusat Statistik mengenai masyarakat miskin, dan juga kami melakukan monitoring secara langsung kepada masyarakat, serta target sasaran yang kami inginkan untuk dijadikan prioritas penerima Program BPNT yaitu masyarakat yang benar-benar kurang mampu dan yang layak untuk menerima Program BPNT sesuai dengan UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Peraturan Daerah Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Dengan demikian peran Dinas Sosial Kota Medan dalam menentukan prioritas masyarakat agar Program BPNT tepat sasaran dengan cara memberikan rekomendasi data masyarakat yang layak

menerima atau tidak layak. Jika terjadi tidak tepat sasaran maka langkah-langkah Dinas Sosial Kota Medan akan melakukan verifikasi data dan validasi data ulang serta berkoordinasi kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Darmitri pada tanggal 07 Februari 2019 pukul 16.00 WIB selaku penerima Program BPNT di Kelurahan Glugur Kota, beliau menyampaikan bahwa kriteria masyarakat yang diharapkan agar bantuan tersebut untuk tepat sasaran yaitu masyarakat yang tergolong kurang mampu, adanya tanggungan anak yang sedang menjalankan pendidikan, tanggungan balita dan lansia serta keluarga yang memiliki penghasilan dibawah angka Rp, 3.000.000/bulan. Dan beliau juga menyampaikan bahwa Program Bantuan Pangan Non Tunai baginya sudah tepat sasaran, hal ini didasari dengan keberlangsungan hidupnya sehari-hari merasa terbantu dengan disalurkan bantuan tersebut ke masyarakat yang tidak mampu. Dari tingkat keberhasilan dapat dilihat bahwa dengan adanya program BPNT mampu menjaga kestabilan keuangan dalam hal biaya pendidikan anak-anak dan membantu kebutuhan makan setiap hari nya.

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Nur Masitah pada tanggal 09 Februari 2019 pukul 16.45 WIB selaku penerima Program BPNT di Kelurahan Glugur Kota, hal senada juga disampaikan oleh beliau bahwa ketepatan sasaran Program Bantuan Pangan Non Tunai yang berhak menerima ini ialah keluarga yang mempunyai tanggungan anak-anak dan wanita-wanita yang memiliki status janda. Dan juga beliau menyampaikan tingkat keberhasilan dari adanya Program

Bantuan Pangan Non Tunai ialah sangat membantu kebutuhan pangan, terutama pangan untuk anak-anak.

Hal senada juga disampaikan dari Ibu Hermita Fanti pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 15.25 WIB selaku penerima Program BPNT di Kelurahan Glugur Kota, beliau menyampaikan juga bahwa ketepatan sasaran dan juga kriteria masyarakat penerima BPNT seperti keluarga miskin serta memiliki tanggungan anak banyak. Dan beliau juga menyebutkan kendala yang ada pada penyaluran Program BPNT ini didasari adanya keterlambatan jaringan saldo yang akan masuk kedalam rekening nya. Namun ia juga menyampaikan tingkat keberhasilan dari Program BPNT ini sangat dapat dirasakan khususnya pemenuhan kebutuhan makanan sehari-hari terjaga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Veni Ivanty pada tanggal 11 Februari pada pukul 16.10 WIB selaku penerima Program BPNT di Kelurahan Glugur Kota juga menyatakan bahwa menurut pendapatnya Program BPNT ini harus tepat sasaran kepada keluarga yang memiliki golongan menengah kebawah dan tanggungan anak yang banyak. Serta menginginkan tepat sasaran nya berupa penyaluran beras nya agar lebih ditingkatkan dan kualitas berasnya lebih baik.

Hasil wawancara dengan Ibu Nur'aini pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 14.55 WIB selaku penerima Program BPNT di Kelurahan Glugur Kota, juga menyatakan bahwa tepat sasaran dari Program BPNT menurut beliau ialah kriteria kehidupan keluarga yang kurang mampu dan suami yang tergolong memiliki pekerjaan tidak tetap. Menurut beliau dengan adanya Program BPNT ini

dapat dikatakan berhasil dalam memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari dan memberikan pertolongan kehidupan keluarga miskin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budiono SH pada tanggal 16 Februari 2019 pukul 13.50 WIB selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Medan Barat, beliau menyatakan bahwa bantuan Program BPNT sudah tepat sasaran, hal ini didasari bahwa peran dari pendamping ialah mengawasi dan mengontrol setiap penyaluran BPNT di lapangan, penyaluran tersebut dilakukan dengan cara setiap Keluarga Penerima Manfaat yang telah mendapatkan saldo dari pusat melalui kartu combo (Kartu Keluarga Sejahtera) sudah bisa menukarkan uang saldo nya dengan bantuan seperti beras dan telur. Beliau juga menyampaikan apabila di lapangan terjadi tidak tepat sasaran bantuan misalnya keluarga yang termasuk kedalam kategori mampu, maka kami selaku petugas akan melaporkannya kepada pemerintah terdekat seperti lurah dan camat dan untuk seterusnya kami akan membuat laporan lanjutan kepada Dinas Sosial Kota Medan agar bisa memberikan tinjauan ulang mengenai data KPM yang bersangkutan.

3) Ketepatan Waktu

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ibu Hermita Vanti pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 15.25 WIB selaku penerima Program BPNT di Kelurahan Glugur Kota, beliau mengatakan waktu pendistribusian BPNT sudah berjalan menurut waktu jadwal yang diperkirakan yakni per 1 tahun hampir setiap bulan, untuk kendala yang dihadapi yaitu mengantri dan lemahnya jaringan ketika pendataan saldo.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ibu Nur'aini pada tanggal 11 Februari 2019 pada pukul 14.55 WIB selaku penerima Program BPNT di Kelurahan Glugur Kota, beliau mengatakan penyaluran bantuan Program BPNT sudah berjalan tepat waktu dan sudah sesuai dengan prosedur nya, dan mengenai kendala yang dihadapi beliau juga menyampaikan kepada peneliti bahwa selama awal program BPNT dilaksanakan hingga saat ini tidak ada kendala.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ibu Nurmasitah pada tanggal 09 Februari 2019 pada pukul 16.45 WIB selaku penerima Program BPNT di Kelurahan Glugur Kota, beliau menyampaikan bahwa prosedur penyaluran Program BPNT sudah sesuai dan ketepatan waktu belum terlalu tepat, masih ada ditemukan kendala nya seperti keterlambatan saja. Beliau juga menyampaikan bahwa bantuan yang didapat seperti beras dan telur hanya bisa bertahan 10-15 hari.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ibu Darmitri pada tanggal 07 Februari 2019 pada pukul 16.00 WIB selaku selaku penerima Program BPNT di Kelurahan Glugur Kota, beliau menyampaikan bahwa Program BPNT belum sesuai dengan prosedurnya dan belum juga tepat waktu, kendala nya juga masih ada. Beliau juga menyampaikan kalau terjadi keterlambatan selaku masyarakat sanga berharap bantuan yang terlambat harus mampu di berikan secara rangkap.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ibu Veni Ivanty pada tanggal 11 Februari 2019 pada pukul 16.10 WIB selaku selaku penerima Program BPNT di Kelurahan Glugur Kota, beliau menyampaikan prosedur dan ketepatan waktu penyaluran Program BPNT sudah sesuai dan sudah tepat waktu, beliau

menyampaikan bantuan yang diterima tidak ada kendala. Kalau seandainya terjadi keterlambatan maka yang dilakukan hanya bisa menunggu dan menanyakan kepada petugas pendamping.

Hasil wawancara peneliti kepada Bapak Reynold Sianturi SE pada tanggal 08 Februari 2019 pukul 10.00 WIB selaku pelaksana Dinas Sosial Kota Medan, beliau menyampaikan bahwa penyaluran Program BPNT pada tahun 2018 sudah berjalan tepat waktu, sesuai dengan prosedurnya yakni dalam 1 tahun setiap bulan masyarakat menerima bantuan tersebut, dan dalam menjalankan Program BPNT mulai dari tahun 2017 hingga saat ini belum terdapat menemukan keterlambatan, hanya saja permasalahan di lapangan yakni masyarakat yang mengalami keterlambatan penyaluran dikarenakan beberapa faktor seperti saldo dari pusat belum masuk kedalam rekening KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Budiono SH selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan pada tanggal 16 Ferbruari 2019 pukul 13.50 WIB, beliau menyampaikan sejauh ini dalam menjalankan tugas nya tidak ada keterlambatan penyaluran, sudah tepat waktu dan sudah sesuai dengan prosedur. Hanya saja masyarakat yang mengalami keterlambatan itu terjadi karena saldo dari pusat belum masuk kedalam rekening KPM, kami sebagai petugas hanya bisa memberikan arahan kepada masyarakat untuk menanyakan kepada pihak bank Himbara seperti Kantor Bank BRI Wilayah, karena untuk permasalahan saldo yang bertanggungjawab itu adalah pihak bank Himbara nya.

4) Tingkat Pendapatan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ibu Darmitri pada tanggal 07 Februari 2019 pukul 16.00 WIB selaku penerima Program BPNT di Kelurahan Glugur Kota, beliau menyampaikan beban rumah tangga yang sangat dirasakan yaitu biaya pendidikan anak-anak mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah atas serba mahal. Menurut beliau dengan adanya bantuan Program BPNT dapat mengatasi dalam biaya pendidikan anak-anak serta dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ibu Hermita Fanti pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 15.25 WIB selaku penerima Program BPNT di Kelurahan Glugur Kota, beliau menyampaikan bahwa beban rumah tangga yang paling sangat dirasakan adalah harga-harga kebutuhan makanan serba mahal dan biaya pendidikan anak-anak juga mahal, dengan adanya bantuan Program BPNT dapat mengatasi kebutuhan makananan sehari-hari bisa dikatakan tercukupi. Beliau juga menyampaikan bahwa dengan adanya Program BPNT diberikan kepada masyarakat dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ibu Nur Masitah pada tanggal 09 Februari 2019 pukul 16.45 WIB selaku penerima Program BPNT di Kelurahan Glugur Kota, beliau juga menyampaikan beban rumah tangga yang paling sangat dirasakan adalah biaya pendidikan anak-anak seperti halnya uang sekolah dan uang buku terlalu mahal. Menurut beliau dengan adanya bantuan Program BPNT sangat mengatasi dalam biaya pendidikan, karena dibantu juga dengan Program PKH. Sangat bersyukur dengan menerima dari kedua program

tersebut beban pengeluaran juga bisa dikatakan mengurangi beban dan sangat membantu. Beliau juga menyampaikan bahwa pengaruh dengan adanya Program BPNT terhadap tingkat pendapatan tidak begitu berpengaruh, hanya saja dapat mengurangi beban dan membantu masyarakat yang kurang mampu.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ibu Veni Ivanty pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 16.10 WIB selaku penerima Program BPNT di Kelurahan Glugur Kota, beliau menyampaikan hal berbeda yakni beban rumah tangga yang paling sangat dirasakan adalah beban sandang dan pangan, beliau menyebutkan bahwa harga kebutuhan sandang dan pangan terlalu mahal. Menurut beliau dengan adanya Program BPNT dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi keluarga dan dapat mengatasi pengeluaran biaya pendidikan anak-anak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ibu Nur'aini pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 14.55 WIB selaku penerima Program BPNT di Kelurahan Glugur Kota, beliau menyatakan bahwa Program BPNT dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat, terkhususnya dalam biaya pendidikan anak-anak serta beliau menyebutkan bahwa beban yang paling sangat dirasakan adalah penghasilan suami yang belum optimal dikarenakan suami memiliki pekerjaan yang tidak tetap.

Hasil wawancara peneliti kepada Bapak Reynold Sianturi SE pada tanggal 08 Februari 2019 pukul 10.00 WIB selaku menjabat sebagai pelaksana program di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Medan, beliau menyatakan hal yang sama bahwa pelaksanaan dan penyaluran yang diberikan dari BPNT kepada masyarakat harus bisa mengurangi beban

masyarakat dan membantu beban kehidupan keluarga, karena pada saat ini beban keluarga yang paling sangat dirasakan ialah biaya pendidikan anak-anak dan biaya kesehatan. Beliau juga mengharapkan kepada masyarakat agar dengan setelah menerima bantuan BPNT mampu menciptakan kemajuan kehidupan keluarga lebih membaik.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada Bapak Budiono SH selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Medan Barat pada tanggal 16 Februari 2019 pukul 13.50 WIB, beliau juga menyampaikan tentang beban kehidupan masyarakat yang paling sangat dirasakan dalam bentuk harga-harga kebutuhan dasar pokok pangan yang tidak stabil, dan beliau menyampaikan semoga dengan adanya Program BPNT dapat mengurangi beban kehidupan masyarakat serta dengan setelah menerima Program BPNT kehidupan setiap KPM lebih membaik. Karena konsep dari BPNT itu sendiri adalah tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu.

5) Ketahanan Pangan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ibu Darmitri pada tanggal 07 Februari 2019 pukul 16.00 WIB selaku penerima Program BPNT di Kelurahan Glugur Kota, beliau menyampaikan bahwa pelaksanaan Program BPNT sudah berhasil dalam meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat serta memberikan rasa perlindungan sosial bagi kehidupan keluarganya. Beliau juga menyampaikan bahwa dirinya belum puas dengan bantuan BPNT dikarenakan kuota beras yang diterima akan bertahan selama 10 hari saja.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ibu Hermita Fanti pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 15.25 WIB selaku penerima Program BPNT di Kelurahan Glugur Kota, beliau menyampaikan bahwa dengan adanya Program BPNT tidak berpengaruh terhadap hidup sehat, dan belum mampu memberikan stabilitas gizi kepada masyarakat karena bantuan yang didapat hanya beras dan telur. Menurut beliau Program BPNT berhasil dalam mengatasi permasalahan kemiskinan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ibu Nur Masitah pada tanggal 09 Februari 2019 pukul 16.45 WIB selaku penerima Program BPNT di Kelurahan Glugur Kota, beliau menyatakan bahwa Program BPNT dapat memberikan stabilitas gizi kepada anak, karena beras sangat penting dalam mempertahankan gizi anak-anak. Dan juga beliau menyampaikan bahwa Bantuan BPNT yang ia terima sudah berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan pangan bagi masyarakat akan tetapi belum maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ibu Veni Ivanty pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 16.10 WIB selaku penerima Program BPNT di Kelurahan Glugur Kota, beliau menyampaikan bahwa dengan menerima bantuan BPNT berupa beras sudah dapat memberikan stabilitas gizi kepada masyarakat, karena dari tahun-tahun sebelumnya hanya menerima kualitas beras yang kurang terbaik, tapi pada tahun ini kualitas beras yang diterima sangat baik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ibu Nur'aini pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 14.55 WIB selaku penerima Program BPNT di Kelurahan Glugur Kota, beliau menyampaikan pelaksanaan BPNT dan penyaluran BPNT

sudah berhasil dalam memberikan perlindungan sosial, sudah berhasil dalam mengatasi kemiskinan, dan membawa kehidupan sehari-hari lebih sejahtera.

Hasil wawancara peneliti kepada Bapak Reynold Sianturi SE pada tanggal 08 Februari 2019 pukul 10.00 WIB selaku menjabat sebagai pelaksana program di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Medan, beliau menyampaikan bahwa pelaksanaan Program BPNT dalam mengatasi permasalahan kemiskinan sudah berhasil akan tetapi belum secara maksimal. Sedangkan manfaat Program BPNT dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat juga sudah berhasil.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada Bapak Budiono SH selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Medan Barat pada tanggal 16 Ferbruari 2019 pukul 13.50 WIB, beliau menyampaikan bahwa tujuan dari BPNT untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat sudah berhasil hanya saja hal yang paling utama adalah untuk mengurangi beban masyarakat. Serta untuk meningkatkan kesejahteraan pangan menurut beliau tergantung masyarakatnya dalam mengelola besaran bantuan yang didapatkan dari Program BPNT.

4.1.3 Analisis Hasil Wawancara

Hasil wawancara menunjukkan bahwa strategi Dinas Sosial Kota Medan dalam menjalankan program BPNT dari pemerintah pusat sudah terlaksana dengan baik, dapat di lihat melalui proses pendataan masyarakat yang menyeluruh dan merata di Kelurahan Glugur Kota. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber dominan menjawab pendataan sudah merata dan menyeluruh di masyarakat Kelurahan Glugur Kota.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa ketepatan sasaran dari Program BPNT sudah tepat sasaran, hal ini didasari bahwa kehidupan sehari-hari narasumber dapat dikatakan kurang mampu, dikarenakan adanya tanggungan anak yang masih menjalankan pendidikan, tanggungan lansia, pekerjaan suami yang tidak tetap dan penghasilan suami di bawah angka Rp. 3.000.000/ bulan. Hal senada juga disampaikan oleh petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pihak Dinas Sosial Kota Medan menyampaikan bahwa masyarakat yang tepat sasaran untuk menerima bantuan program BPNT ini ialah masyarakat yang sudah menjalankan proses verifikasi data, validasi data, dan lolos dalam tahapan survey fisik kondisi rumah.

Hasil wawancara tentang ketepatan waktu, bahwa penyaluran program BPNT belum berjalan sesuai waktu yang telah ditentukan, hal ini didasari bahwa adanya terjadi keterlambatan penyaluran bantuan. Narasumber juga menyampaikan kepada peneliti bahwa penyaluran bantuan BPNT sering mengalami keterlambatan, bahkan menyebutkan tidak menerima bantuan selama satu bulan hingga dua bulan. Hal senada juga disampaikan oleh pihak Dinas Sosial Kota Medan dan petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan menyebutkan bahwa keterlambatan itu terjadi karena saldo dari Himbara nya, kami tidak mempunyai wewenang dalam menyelesaikan tugas seperti itu, sudah jelas sumber saldo yang diberikan kepada masyarakat berasal dari pusat.

Hasil wawancara tentang tingkat pendapatan, bahwa dengan adanya Program BPNT tingkat pendapatan juga sangat mempengaruhi antara penghasilan dan pengeluaran. Dengan diberikan bantuan berupa beras dan telur adalah solusi

paling utama pada saat ini, karena harga-harga seperti kebutuhan pokok pangan mengalami ketidakstabilannya, serta harga pendidikan anak-anak terlalu mahal. Maka dengan demikian pelaksanaan Program BPNT sudah mampu memberikan pertolongan dan membantu masyarakat dalam menjaga stabilitas pendapatan.

Hasil wawancara tentang ketahanan pangan, bahwa dengan adanya Program BPNT mampu memberikan perlindungan sosial kepada setiap KPM (Keluarga Penerima Manfaat) hal ini didasari bahwa narasumber penerima bantuan menyampaikan dengan adanya BPNT kami sangat terbantu dan kebutuhan pangan terkendali dengan baik.

4.2 Pembahasan.

Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berfokuskan kepada aspek pangan bagi masyarakat yang termasuk kedalam kategori miskin. Pelaksanaan Program BPNT tersebut sudah berjalan dari tahun 2017, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan. Dengan dilaksanakannya program tersebut, Pemerintah sangat menginginkan adanya penurunan angka kemiskinan, mampu memberikan perlindungan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Tujuan utama dari Program Bantuan Pangan Non Tunai yaitu mengurangi beban pengeluaran, memberikan gizi yang lebih seimbang, meningkatkan

ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaan program agar tercapainya tujuan program yakni memberikan kesejahteraan kepada masyarakat miskin, maka dibutuhkan dengan adanya strategi, ketepatan sasaran dan ketepatan waktu sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat program BPNT dalam aspek kesejahteraan tingkat pendapatan dan ketahanan pangan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan efektivitas pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai sudah berjalan dengan baik tetapi belum optimal, hal ini didasari bahwa penyaluran Program BPNT masih terdapat keterlambatan dan masyarakat belum merasakan sepenuhnya manfaat dari Program BPNT.

1) Strategi Program

Hasil wawancara narasumber masyarakat menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai tersebut sudah sesuai dengan prosedur, hal ini didasari dengan adanya proses pendataan yang baik kepada masyarakat dan memberikan sosialisasi serta penyuluhan mengenai materi Program Bantuan Pangan Non Tunai yang diselenggarakan di Kelurahan Glugur Kota.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Reynold Sianturi SE selaku pelaksana program Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Medan bahwa beliau mengatakan strategi yang di laksanakan sudah berjalan dengan baik dengan menyelenggarakan survey secara langsung kepada masyarakat, melaksanakan proses pendataan, dan melaksanakan dokumentasi fisik rumah masyarakat.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Budiono SH selaku tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan Medan Barat, beliau mengatakan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai sudah terlaksana dengan baik, dikarenakan masyarakat sudah melalui tahapan-tahapan pendataan seperti masyarakat memberikan surat keterangan tidak mampu dan mendokumentasi bentuk rumah masyarakat penerima yang selanjutnya akan dikirim ke pusat.

2) Ketepatan Sasaran

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa secara keseluruhan masyarakat Kelurahan Glugur Kota sudah mengetahui yang berhak menerima Program Bantuan Pangan Non Tunai. Masyarakat juga mengatakan bahwa yang berhak dan menjadi prioritas menerima Program BPNT ialah keluarga yang tergolong tidak mampu, keluarga yang berpenghasilan rendah, mempunyai tanggungan anak dan lansia, serta wanita-wanita yang memiliki status janda.

Menurut hasil wawancara Bapak Reynold Sianturi SE menyatakan bahwa penyaluran Program BPNT sudah tepat sasaran, hal ini didasari dengan adanya data yang terkumpul, Dinas Sosial Kota Medan akan memberikan rekomendasi masyarakat yang layak untuk menerima bantuan bagi yang benar-benar kurang mampu sesuai dengan UU No 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Budiono SH, penyaluran Program BPNT sudah tepat sasaran, karena masyarakat yang menerima atau terdaftar sebagai KPM itu adalah masyarakat yang lulus dari verifikasi data mapun survey langsung. Masyarakat yang akan dijadikan prioritas penerima BPNT ini adalah pola kehidupan dibawah garis kemiskinan.

3) Ketepatan Waktu

Menurut hasil wawancara narasumber mengenai ketepatan waktu, masyarakat Kelurahan Glugur Kota menyampaikan bahwa penyaluran bantuan BPNT berupa beras dan telur masih sering terjadi keterlambatan waktu. Hal ini disampaikan oleh Ibu Nurmasitah selaku penerima BPNT di Kelurahan Glugur Kota bahwa penyaluran BPNT pernah mengalami keterlambatan, upaya masyarakat ialah dengan menyampaikan pengaduan kepada petugas pendamping agar bantuan yang terlambat untuk kedepannya diberikan secara *double*.

Hasil wawancara dengan Bapak Reynold selaku pelaksana program di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Medan menyampaikan bahwa keterlambatan yang terjadi pada penyaluran BPNT dikarenakan adanya gangguan sistem pada pusat, maka saldo yang diberikan kepada KPM tidak masuk. Upaya yang bisa dilakukan ialah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan menyampaikan informasi di lapangan kepada mereka.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Budiono SH selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Medan Barat bahwa keterlambatan itu terjadi pada akhir tahun dan awal tahun. Untuk penyaluran di tahun-tahun sebelumnya tidak terjadi keterlambatan, sudah menjadi hal yang biasa dikarenakan adanya rekapitulasi ulang mengenai anggaran tahun sebelumnya menuju anggaran tahun berikutnya.

4) Tingkat Pendapatan

Menurut hasil wawancara, narasumber masyarakat menyampaikan bahwa dengan adanya pelaksanaan Program BPNT tidak mempengaruhi tingkat

pendapatan, hanya saja membantu dan mengatasi beban pengeluaran terkhusus untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Dengan menerima bantuan Program BPNT manajemen keuangan keluarga dapat terkelola dengan baik, karena perbedaan antara penghasilan dan pengeluaran, lebih banyak jumlah pengeluaran. Karena harga-harga kebutuhan sedang tidak stabil dan biaya pendidikan terjangkau mahal.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Reynold selaku pelaksana program di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Medan menyampaikan bahwa tujuan utama dengan diselenggarakannya program BPNT yakni mengharapkan agar beban pengeluaran masyarakat tetap terkendali, untuk mempertahankan kebutuhan sehari-hari dan membantu KPM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi keluarga.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Budiono SH selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Medan Barat beliau menyampaikan bahwa Program BPNT dapat mengatasi beban pengeluaran masyarakat, dapat mempengaruhi beban pengeluaran masyarakat, dan dapat mengurangi beban kehidupan masyarakat yang saat ini harga-harga kebutuhan dasar pangan seperti beras sedang terjadi ketidakstabilan.

5) Ketahanan Pangan

Hasil wawancara masyarakat menyampaikan bahwa dengan adanya Program BPNT belum membawa kesejahteraan secara maksimal, hanya saja kebutuhan pangan keluarga tetap stabil walau bertahan sampai dengan 10-14 hari, karena jumlah beras yang kami dapatkan per bulan sebesar 8kg-10kg dan telur

sebanyak 10-20 butir per bulan. Berdasarkan pembahasan mengenai stabilitas gizi, bahwa BPNT sangat membantu dalam menjaga kestabilan gizi, karena hal yang di takutkan oleh masyarakat terhadap anak-anak nya yakni penyakit gizi buruk. Maka dengan menerima bantuan Program BPNT anak-anak kami tetap bergizi, bernutrisi dan mengenal hidup sehat. Masyarakat sangat berharap agar bantuan BPNT di pertambah lagi kuantitas berasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Reynold selaku pelaksana program di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Medan menyampaikan bahwa pelaksanaan BPNT di Kelurahan Glugur Kota saat ini sudah berhasil dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat dalam aspek ketahanan pangan.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Budiono SH selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Medan Barat beliau menyampaikan bahwa program BPNT berhasil dan mengatasi permasalahan keluarga miskin, kalau membahas tingkat kesejahteraan nya tergantung kepada KPM dalam mengatur dan mengelola bantuan yang didapatkan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Penerima Manfaat Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi Dinas Sosial Kota dalam mengemban tugasnya untuk menjalankan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah berjalan dengan baik atau bisa dikatakan efektif, hal ini didasari dengan adanya kegiatan-kegiatan sosialisasi dan penyuluhan mengenai materi program BPNT kepada masyarakat. Beserta proses pendataan yang merata dan menyeluruh di Kelurahan Glugur Kota dan melaksanakan survey rumah masyarakat secara fisik. Dinas Sosial Kota Medan adalah perangkat daerah yang ikut serta menjalankan Program Pemerintah Pusat dan melakukan hubungan bekerjasama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Badan Pusat Statistik Kota Medan, Kepolisian, Agent Brilink, E-Warong, Kecamatan dan Kelurahan.
2. Ketepatan sasaran mengenai penyaluran bantuan Program BPNT sudah tepat sasaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal ini didasari bahwa yang menjadi prioritas penerima Program BPNT adalah keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan, berpenghasilan rendah,

yang mempunyai tanggungan anak dan lansia, serta wanita-wanita yang memiliki status janda.

3. Ketepatan waktu penyaluran bantuan Program BPNT belum sepenuhnya tepat waktu. Hal ini didasari terjadinya keterlambatan penyaluran BPNT di akhir tahun 2018 dan awal tahun 2019, disebabkan oleh beberapa faktor yakni sistem jaringan yang mengakibatkan saldo terlambat masuk ke rekening KPM (Keluarga Penerima Manfaat).
4. Tingkat Pendapatan, dengan adanya pelaksanaan Program BPNT dan penerimaan bantuan berupa beras dan telur, dapat dikatakan tidak berpengaruh dalam tingkat pendapatan melainkan dengan adanya pelaksanaan Program BPNT mampu mengatasi dan membantu beban pengeluaran masyarakat.
5. Ketahanan Pangan, dengan adanya pelaksanaan dan penyaluran Program BPNT kepada masyarakat dapat dikatakan berjalan dengan efektif. Sehingga masyarakat yang tidak mampu merasa terbantu, memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari dan pola gizi bagi tanggungan nya bisa dikatakan sejahtera.

5.2 Saran

Saran adalah suatu gagasan yang memberikan masukan atau rekomendasi untuk menyempurnakan hasil dari sebuah penelitian. Adapun saran sebagai masukan bagi pihak terkait dan yang ikut serta dalam menjalankan pelaksanaan maupun penyaluran Program BPNT ialah :

1. Agar pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai berjalan dengan baik di seluruh kelurahan yang tersebar di Kota Medan, maka seharusnya Dinas Sosial Kota Medan dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan melakukan komunikasi serta koordinasi dengan baik kepada pihak-pihak yang ikut serta terutama kepada pihak bank Himbara.
2. Agar pelaksanaan dan penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai tepat sasaran, maka petugas yang melakukan survey secara langsung di lapangan harus professional dalam bekerja, melakukan kajian-kajian teori sosiologi perkotaan khususnya permasalahan kemiskinan.
3. Agar pelaksanaan dan penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai tepat waktu, maka pihak-pihak yang terkait melakukan koordinasi serta mediasi kepada pemerintah pusat, agar masyarakat tidak kebingungan ketika terjadi keterlambatan serta adanya transparansi pemberitahuan kepada masyarakat.
4. Agar tujuan program BPNT mengenai mengurangi beban pengeluaran masyarakat tercapai maka seharusnya besaran bantuan yang diterima masyarakat harus ditingkatkan, demi membantu dan meringankan beban kehidupannya.
5. Diharapkan peran pemerintah daerah harus hadir dalam persoalan-persoalan kemiskinan dan dapat menciptakan program-program terbaru yang berfokuskan untuk mewujudkan masyarakat Kota Medan yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

Gie, The Liang. 2007. *Administrasi Perkantoran Modern: Edisi Keempat*. Yogyakarta: Liberty.

Iskandar A. 2012. *Paradigma Baru Benchmarking Kemiskinan*. Bogor : PT Penerbit IPB Press.

Jamaluddin, Adon Nasrullah. 2017. *Sosiologi Perkotaan*. Bandung: Pustaka Setia.

Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.

Maipita, Indra. 2014. *Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Moleong, J. Lexy. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosadakarya.

Robbins, P. Stephen. 2010. *Manajemen: Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Sjafari, Agus. 2014. *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Peneliiian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sumaryadi, I nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.

Sutrisno, Edy. 2013. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Peraturan-Peraturan.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 tentang Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Bab IV Pasal 19 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Sumber lainnya

Buku Pedoman Umum Program Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2017.

Website

<https://moehs.wordpress.com/2013/11/08/konsep-kesejahteraan-dalam-islam-tafsir-tahlily/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Heri Gunawan
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 11 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Multatuli link III No 15A Kelurahan Hamdan
Kecamatan Medan Maimun.
Anak ke : 3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara

Data Orang Tua

Nama Ayah : Syamsudirman
Nama Ibu : Sri Sayekti
Pekerjaan Ayah : Pedagang
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Multatuli link III No 15A Kelurahan Hamdan
Kecamatan Medan Maimun.

Pendidikan Formal

2003-2009 : SD Swasta Angkasa 1 Lanud Medan.
2009-2012 : SMP Swasta Al-Ulum Medan.
2012-2015 : SMA Swasta Muhammadiyah 1 Medan.
2015-2019 : S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial UMSU

Medan, Maret 2019

Heri Gunawan

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Foto Bersama Masyarakat Penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat.







Foto Bersama Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Medan.



Foto Bersama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Medan Barat.



PEDOMAN WAWANCARA

Untuk : Dinas Sosial Kota Medan

Nama : Reynold Sianturi. SE
Jabatan : Pelaksana Dinas Sosial Kota Medan

a. Strategi Program

1. Bagaimanakah upaya Dinas Sosial Kota Medan dalam melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) agar dapat berjalan dengan baik di masyarakat ?

Jawaban: Upaya yang dilaksanakan agar berjalan dengan baik di masyarakat ialah melakukan sosialisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bersama-sama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang bertujuan untuk KPM nya dapat memahami dan mengetahui tujuan utama Program BPNT ini disalurkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia.

2. Apakah Program BPNT sudah terlaksana dengan baik di berbagai kecamatan ataupun kelurahan yang ada di Kota Medan ?

Jawaban: Sudah terlaksana dengan baik.

3. Apakah Program BPNT yang telah terlaksana, sudah tersalurkan dengan baik di Masyarakat Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat ?

Jawaban: Sampai saat ini penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Glugur Kota terlaksana dengan baik.

4. Apa saja kendala Dinas Sosial Kota Medan dalam menjalankan pelaksanaan Program BPNT di Kelurahan Glugur Kota ?

Jawaban: Tidak ada kendala.

5. Darimana sumber dana Program BPNT tersebut ?

Jawaban: Sumber dana nya ialah APBN yang dikelola Kementerian Sosial Republik Indonesia.

6. Sudah berjalan berapa tahun Program BPNT yang terselenggarakan di Dinas Sosial Kota Medan ?

Jawaban: Dilaksanakan mulai pada tahun 2017 di Kota Medan, berarti sudah hampir dua tahun Program BPNT terselenggarakan.

7. Sudah berapa banyak Program BPNT dilaksanakan di Kecamatan yang ada di Kota Medan ?

Jawaban: Bisa dikatakan hampir seluruh Kecamatan yang ada di Kota Medan sudah melaksanakan program BPNT. Total keseluruhannya ialah 21 Kecamatan yang tersebar di Kota Medan.

8. Apakah ada program bantuan lainnya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Medan selain dari Program BPNT ?

Jawaban: Ada, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH)

b. Ketepatan Sasaran

1. Apakah Program BPNT sudah tepat sasaran ?

Jawaban : Sudah tepat sasaran.

2. Bagaimana cara Dinas Sosial untuk menentukan masyarakat yang tergolong penerima BPNT ?

Jawaban: Cara yang kami tentukan ialah dengan menggunakan data BPS tahun 2015.

3. Target sasaran masyarakat yang seperti apa untuk dijadikan prioritas penerima Program BPNT ?

Jawaban: Masyarakat yang dijadikan prioritas penerima BPNT yaitu masyarakat yang benar-benar kurang mampu dan yang layak untuk menerima Program BPNT sesuai dengan UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Peraturan Daerah Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

4. Persyaratan yang seperti apa dilakukan masyarakat agar terdaftar sebagai penerima Program BPNT ?

Jawaban: Persyaratan yang harus dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan melampirkan copyan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Biasanya untuk pembuktian secara valid pihak dinas juga melakukan survey langsung ke rumah penduduk dengan semacam kunjungan langsung serta mendokumentasikan foto rumah penduduk hadap depan, belakang, samping dan dalam.

5. Apa harapan Dinas Sosial Kota Medan terhadap tercapainya sasaran ?

Jawaban: Harapan Dinas Sosial Kota Medan adalah sangat menginginkan penyaluran program BPNT dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang tergolong penerima, tepat waktu, tepat guna. Dan yang paling utama ialah masyarakat miskin.

6. Apa langkah-langkah yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan apabila sasaran tidak tercapai ?

Jawaban: Langkah yang dilakukan yakni berkoordinasi dengan Kemensos RI dan melakukan verifikasi ulang data agar bantuan BPNT tepat sasaran. Karena Dinas Sosial Kota Medan hanya bisa merekomendasikan masyarakat layak atau tidak layak untuk mendapatkan BPNT.

7. Apakah pendataan masyarakat penerima BPNT sudah secara menyeluruh dan merata di Lingkungan Kelurahan Glugur Kota ?

Jawaban: Pendataan masyarakat sudah menyeluruh dengan cara verifikasi dan validasi data melalui Sukopendo.

8. Bekerjasama dengan siapa saja agar pelaksanaan Program BPNT dapat terlaksana dengan maksimal ?

Jawaban: Bekerjasama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Kepolisian, Bank Himbara melalui BRI, E-Warong dan Agent Brilink, dan Bulog.

c. Ketepatan Waktu

1. Apakah Program BPNT sudah berjalan tepat waktu ?

Jawaban: Ditahun 2018 sudah berjalan tepat waktu.

2. Apakah waktu pendistribusian BPNT sudah berjalan dengan semestinya ?

Jawaban: Sudah berjalan dengan semestinya.

3. Dalam kurun waktu 1 Tahun, berapa bulan sekali masyarakat mendapatkan Program BPNT ?

Jawaban: Hampir setiap bulan masyarakat mendapatkan BPNT.

4. Apakah dalam proses pendistribusian BPNT pernah mengalami keterlambatan ?

Jawaban: Tidak.

5. Upaya apa yang dilakukan Dinas Sosial jika terjadi keterlambatan pendistribusian Program BPNT ?

Jawaban: Yang dapat dilakukan ya berkomunikasi dengan pihak bulog agar pendistribusian tersalurkan.

6. Apakah Program BPNT tersebut dapat benar-benar dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan usahanya ?

Jawaban: Tidak, karena Program BPNT ini memfokuskan bantuan Pangan yang diberikan kepada para KPM, dan hanya untuk kebutuhan pangan saja. Kalau untuk mengembangkan usaha paling para pelaku E-Warong bukan penerima BPNT nya.

7. Tingkat perkembangan usaha masyarakat seperti apa yang dapat dilihat setelah menerima Program BPNT ?

Jawaban: Tidak ada.

8. Bagaimanakah perasaan Dinas Sosial jika proses pendistribusian tepat waktu ?

Jawaban: Akan merasa sangat senang.

d. Tingkat Pendapatan.

1. Apakah pelaksanaan Program BPNT sudah sesuai dengan tujuan program ?

Jawaban: Sudah sesuai.

2. Apakah pelaksanaan Program BPNT dapat mempengaruhi beban pengeluaran masyarakat ?

Jawaban: Iya mempengaruhi.

3. Apakah program BPNT dapat mengatasi beban pengeluaran masyarakat ?

Jawaban: Kalau dibilang mengatasi tidak juga, hanya saja yang paling tepat itu adalah membantu. Ya membantu beban pengeluaran masyarakat.

4. Apakah dengan adanya Program BPNT di Kelurahan Glugur Kota dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi keluarga ?

Jawaban: Dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi keluarga.

5. Apakah dengan adanya Program BPNT dapat mengurangi beban kehidupan keluarga ?

Jawaban: Ya dapat mengurangi beban nya.

6. Dalam bentuk apa beban kehidupan keluarga yang sangat dirasakan oleh masyarakat ?

Jawaban: Pada umumnya beban kehidupan keluarga yang sangat dirasakan masyarakat sehari-harinya pasti biaya pendidikan anak-anaknya dan biaya kesehatan.

7. Apakah setelah menerima Program BPNT kemajuan kehidupan masyarakat lebih membaik ?

Jawaban: harusnya sih iya, setelah menerima BPNT ini diharapkan kehidupan nya lebih membaik.

8. Apakah masyarakat menginginkan bantuan melalui program selain BPNT dalam meningkatkan kesejahteraan pendapatan ?

Jawaban: Ya pastinya masyarakat menginginkan.

e. Ketahanan Pangan

1. Apakah dengan Program BPNT, masyarakat sudah mengenal hidup sehat ?

Jawaban: Kurang mengetahui.

2. Apakah Program BPNT dapat memberikan stabilitas gizi kepada masyarakat ?

Jawaban: Sudah.

3. Apakah tujuan BPNT sudah berhasil dalam melaksanakan meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat ?

Jawaban: Iya berhasil.

4. Apakah manfaat Program BPNT sudah berhasil dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat ?

Jawaban: Untuk saat ini sudah memberikan perlindungan sosial.

5. Apakah Program BPNT juga berhasil untuk mengatasi permasalahan keluarga miskin ?

Jawaban: Iya berhasil tapi belum secara maksimal.

6. Apakah Program BPNT juga berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan pangan bagi masyarakat ?

Jawaban: Iya berhasil.

7. Apakah masyarakat merasa puas dengan adanya Program BPNT ?

Jawaban: Iya berhasil.

8. Apakah masyarakat setelah menerima Program BPNT kehidupannya lebih sejahtera ?

Jawaban: Tergantung pengelolaan keuangan para KPM.

PEDOMAN WAWANCARA
Untuk Penerima Program BPNT (Masyarakat)

Nama : Darmitri
Usia : 47 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan

a. Strategi Program

1. Bentuk usaha seperti apa yang dilakukan masyarakat untuk terdaftar sebagai penerima BPNT ?

Jawaban : Usaha yang dilakukan adalah memberikan data berupa kartu keluarga kepada petugas pendamping.

2. Apakah proses pendataan masyarakat di Kelurahan Glugur Kota sudah terlaksana dengan baik ?

Jawaban: Dalam beberapa tahun ini terlaksana dengan baik.

3. Apakah dengan adanya program BPNT mampu membawa masyarakat lebih sejahtera ?

Jawaban: Lumayan saja, untuk membawa sejahtera belum tentu tapi bisa membantu.

4. Bentuk bantuan seperti apa yang diterima masyarakat dari Program BPNT ?

Jawaban: Bentuk bantuan seperti beras dan telur.

5. Berapa besaran bantuan yang diterima masyarakat dari Program BPNT ?

Jawaban: Besaran nya ya berkisar Rp 110.000.

6. Berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan bantuan dari Program BPNT ?

Jawaban: Kalau jangka waktunya ya sekitar dua tahun.

7. Apakah masyarakat merasa terbantu dengan adanya Program BPNT ?

Jawaban: Iya merasa terbantu, cuman ya untuk membantu kebutuhan makan setiap harinya, terutama beras.

8. Apakah pelaksanaan Program BPNT dalam kurun waktu 1 Tahun diadakan di satu kelurahan saja atau diadakan di beberapa kelurahan ?

Jawaban: Dibeberapa kelurahan.

b. Ketepatan Sasaran.

1. Kriteria masyarakat yang seperti apa dalam menerima Program BPNT ?

Jawaban: Ya seperti ada tanggungan anak yang sedang menjalankan pendidikan, tanggungan balita, lansia dan juga yang mempunyai penghasilan rata-rata dibawah Rp, 3.000.000/bulan.

2. Apakah ada kendala yang dihadapi masyarakat dalam proses sasaran Program BPNT ?

Jawaban: Ada kendalanya, seperti sasaran nya keterlambatan waktu penyaluran saja.

3. Apa maksud dari Program BPNT diberikan kepada masyarakat ?

Jawaban: Menurut saya ya membantu untuk masyarakat yang tidak mampu.

4. Sebelum adanya Program BPNT terlaksana, apakah masyarakat sudah disurvei oleh tim pendamping ?

Jawaban: Sudah disurvei oleh pendamping.

5. Sasaran seperti apa yang diharapkan dari Program BPNT ?

Jawaban: Sasaran nya ya seperti melihat tipe kehidupan dari keluarga nya.

6. Wirausaha apa yang dikembangkan masyarakat melalui penyaluran Program BPNT ?

Jawaban: Sampai saat ini belum ada.

7. Tingkat keberhasilan yang bagaimana didapatkan masyarakat dari penerimaan Program BPNT ?

Jawaban: Tingkat keberhasilannya menurut ibu dalam beberapa bulan ini ya bisa membantu untuk biaya pendidikan dan persediaan beras tetap terjaga.

8. Apakah pendataan masyarakat penerima BPNT sudah secara menyeluruh dan merata di Lingkungan Kelurahan Glugur Kota ?

Jawaban: Belum keseluruhan nya, masih juga terlihat belum tercapai.

c. Ketepatan Waktu.

1. Apakah Program BPNT sudah sesuai dengan prosedurnya ?

Jawaban: Belum.

2. Apakah waktu pendistribusian BPNT sudah berjalan menurut jadwal yang diperkirakan ?

Jawaban: Belum.

3. Apakah ada kendala dalam pendistribusian BPNT ?

Jawaban: Masih ada.

4. Upaya apa yang dilakukan masyarakat jika terjadi keterlambatan penyaluran Program BPNT ?

Jawaban: Upaya yang dilakukan hanya menanyakan kepada petugas pendamping nya saja.

5. Dalam waktu 1 tahun, berapa bulan sekali masyarakat mendapatkan Program BPNT ?

Jawaban: Hampir setiap bulan nya dapat.

6. Apakah dengan adanya pelaksanaan Program BPNT dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat untuk melakukan pengembangan usaha ?

Jawaban: Ya kalau ada usahanya bisa dikembangkannya dengan adanya BPNT itu.

7. Bagaimana tingkat perkembangan usaha masyarakat setelah menerima Program BPNT ?

Jawaban: Untuk tingkat perkembangannya itu masih belum.

8. Bagaimana pengaruh Program BPNT terhadap masyarakat miskin yang tidak memiliki usaha ?

Jawaban: Tidak ada pengaruhnya, masih biasa-biasa saja.

d. Tingkat Pendapatan.

1. Apakah dengan adanya Program BPNT dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat ?

Jawaban: Dapat mengurangi beban.

2. Apakah dengan adanya Program BPNT dapat mempengaruhi tingkat pendapatan/penghasilan masyarakat ?

Jawaban: Bisa mempengaruhi.

3. Apakah pelaksanaan Program BPNT di masyarakat Kelurahan Glugur Kota dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi keluarga ?

Jawaban: Bisa, tergantung orang nya dalam mengendalikan keuangan nya.

4. Apakah dengan adanya Program BPNT dapat mengatasi pengeluaran beban kehidupan rumah tangga khususnya dalam biaya pendidikan anak-anak ?

Jawaban: Dapat mengatasi.

5. Bentuk beban rumah tangga seperti apa yang paling sangat dirasakan dalam kehidupan ?

Jawaban: Bentuk beban rumah tangga paling dirasakan ya biaya anak sekolah mulai dari SD, SMP dan SMA semua nya serba mahal.

6. Bentuk pertumbuhan ekonomi yang bagaimana dapat dilihat pada masyarakat di Kelurahan Glugur Kota dari bantuan Program BPNT ?

Jawaban: Tidak ada.

7. Apakah setelah menerima Program BPNT, kemajuan kehidupan rumah tangga lebih membaik ?

Jawaban: Ya bisa dikatakan membaik.

8. Apakah masyarakat menginginkan bantuan Program lain selain dari Program BPNT dalam melakukan pengembangan usaha ?

Jawaban: Ya kalau ada program lain, saya sangat menginginkan nya.

e. Ketahanan Pangan.

1. Apakah dengan Program BPNT, masyarakat sudah mengenal hidup sehat ?

Jawaban: Sudah.

2. Apakah Program BPNT dapat memberikan stabilitas gizi kepada masyarakat ?

Jawaban: Bisa memberikan.

3. Apakah tujuan BPNT sudah berhasil dalam melaksanakan meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat ?

Jawaban: Bisa meningkatkan ketahanan pangan.

4. Apakah manfaat Program BPNT sudah berhasil dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat ?

Jawaban: Bisa memberikan perlindungan sosial.

5. Apakah Program BPNT juga berhasil untuk mengatasi permasalahan keluarga miskin ?

Jawaban: Dikatakan berhasil belum tentu juga. Hanya saja bisa mengatasi permasalahan kemiskinan.

6. Apakah Program BPNT juga berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan pangan bagi masyarakat ?

Jawaban: Lumayan lah, karena tiap per bulan nya mendapatkan beras.

7. Apakah masyarakat merasa puas dengan adanya Program BPNT ?

Jawaban: Menurut ibu ya belum puas.

8. Apakah masyarakat setelah menerima Program BPNT kehidupan sehari-hari nya lebih sejahtera ?

Jawaban: Belum dikatakan sejahtera, karena masih terdapat banyak kendalanya. Kendalanya bisa berupa keterlambatan, yang biasanya per bulan dapat kadang sampai 3 bulan bahkan 7 bulan.

PEDOMAN WAWANCARA
Untuk Penerima Program BPNT (Masyarakat)

Nama : Hermita Fanti

Usia : 46 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

a. Strategi Program

1. Bentuk usaha seperti apa yang dilakukan masyarakat untuk terdaftar sebagai penerima BPNT ?

Jawaban: Ya berdasarkan pendataan, menyerahkan data seperti kartu keluarga dan kartu tanda penduduk kepada petugas.

2. Apakah proses pendataan masyarakat di Kelurahan Glugur Kota sudah terlaksana dengan baik ?

Jawaban: Baik.

3. Apakah dengan adanya program BPNT mampu membawa masyarakat lebih sejahtera ?

Jawaban: Ya mampu.

4. Bentuk bantuan seperti apa yang diterima masyarakat dari Program BPNT ?

Jawaban: Beras, telur dan pernah dapat gula.

5. Berapa besaran bantuan yang diterima masyarakat dari Program BPNT ?

Jawaban: Rp, 110.000/bulan.

6. Berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan bantuan dari Program BPNT ?

Jawaban: Sebulan sekali.

7. Apakah masyarakat merasa terbantu dengan adanya Program BPNT ?

Jawaban: Ya terbantu.

8. Apakah pelaksanaan Program BPNT dalam kurun waktu 1 Tahun diadakan di satu kelurahan saja atau diadakan di beberapa kelurahan ?

Jawaban: Diadakan dibeberapa kelurahan.

b. Ketepatan Sasaran.

1. Kriteria masyarakat yang seperti apa dalam menerima Program BPNT ?

Jawaban: Keluarga yang mempunyai tanggungan anak banyak, keluarga miskin dan tidak mampu.

2. Apakah ada kendala yang dihadapi masyarakat dalam proses sasaran Program BPNT ?

Jawaban: Ya ada kendala nya berupa lambatnya jaringan untuk melakukan pendataan masyarakat.

3. Apa maksud dari Program BPNT diberikan kepada masyarakat ?

Jawaban: Untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.

4. Sebelum adanya Program BPNT terlaksana, apakah masyarakat sudah disurvei oleh tim pendamping ?

Jawaban: Sudah, Sudah di survey.

5. Sasaran seperti apa yang diharapkan dari Program BPNT ?

Jawaban: Sasaran nya ya paling semoga saja tepat waktu dan tidak ada keterlambatan.

6. Wirausaha apa yang dikembangkan masyarakat melalui penyaluran Program BPNT ?

Jawaban: Tidak ada.

7. Tingkat keberhasilan yang bagaimana didapatkan masyarakat dari penerimaan Program BPNT ?

Jawaban: Sudah lumayan berhasil, terutama untuk kebutuhan makanan sehari-hari.

8. Apakah pendataan masyarakat penerima BPNT sudah secara menyeluruh dan merata di Lingkungan Kelurahan Glugur Kota ?

Jawaban: Kalau di Kelurahan ini sudah.

c. Ketepatan Waktu

1. Apakah Program BPNT sudah sesuai dengan prosedurnya ?

Jawaban: Sudah.

2. Apakah waktu pendistribusian BPNT sudah berjalan menurut jadwal yang diperkirakan ?

Jawaban: Sudah.

3. Apakah ada kendala dalam pendistribusian BPNT ?

Jawaban: Kendalanya seperti mengantri dan lemahnya sinyal pada jaringan pendataan.

4. Upaya apa yang dilakukan masyarakat jika terjadi keterlambatan penyaluran Program BPNT ?

Jawaban: Menunggu kabar dan mengharapkan bantuannya di dapat secara double.

5. Dalam waktu 1 tahun, berapa bulan sekali masyarakat mendapatkan Program BPNT ?

Jawaban: Sebulan sekali.

6. Apakah dengan adanya pelaksanaan Program BPNT dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat untuk melakukan pengembangan usaha ?

Jawaban: Untuk usaha tidak, tapi untuk kebutuhan makanan sehari-hari maksimal.

7. Bagaimana tingkat perkembangan usaha masyarakat setelah menerima Program BPNT ?

Jawaban: Tidak juga.

8. Bagaimana pengaruh Program BPNT terhadap masyarakat miskin yang tidak memiliki usaha ?

Jawaban: Ya pengaruhnya merasa terbantu untuk kebutuhan sehari-harinya.

d. Tingkat Pendapatan

1. Apakah dengan adanya Program BPNT dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat ?

Jawaban: Dapat mengurangi

2. Apakah dengan adanya Program BPNT dapat mempengaruhi tingkat pendapatan/penghasilan masyarakat ?

Jawaban: Enggak.

3. Apakah pelaksanaan Program BPNT di masyarakat Kelurahan Glugur Kota dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi keluarga ?

Jawaban: Lumayan.

4. Apakah dengan adanya Program BPNT dapat mengatasi pengeluaran beban kehidupan rumah tangga khususnya dalam biaya pendidikan anak-anak ?

Jawaban: Kalau untuk biaya pendidikan anak belum begitu mengatasi.
Tapi kalau untuk kebutuhan makanan sehari-hari tercukupi.

5. Bentuk beban rumah tangga seperti apa yang paling sangat dirasakan dalam kehidupan ?

Jawaban: Harga kebutuhan serba mahal, uang sekolah anak, kebutuhan anak sekolah meningkat.

6. Bentuk pertumbuhan ekonomi yang bagaimana dapat dilihat pada masyarakat di Kelurahan Glugur Kota dari bantuan Program BPNT ?

Jawaban: Tidak terlihat.

7. Apakah setelah menerima Program BPNT, kemajuan kehidupan rumah tangga lebih membaik ?

Jawaban: Lumayan membaiklah, karena sudah tidak membeli beras lagi.

8. Apakah masyarakat menginginkan bantuan Program lain selain dari Program BPNT dalam melakukan pengembangan usaha ?

Jawaban: Kalau bisa iya, dan kalau bisa juga program lainnya ditambah untuk melakukan pengembangan usaha.

e. Ketahanan Pangan.

1. Apakah dengan Program BPNT, masyarakat sudah mengenal hidup sehat ?

Jawaban: Belum juga, dan tidak ada pengaruh.

2. Apakah Program BPNT dapat memberikan stabilitas gizi kepada masyarakat ?

Jawaban: Enggak.

3. Apakah tujuan BPNT sudah berhasil dalam melaksanakan meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat ?

Jawaban: Belum.

4. Apakah manfaat Program BPNT sudah berhasil dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat ?

Jawaban: Belum berhasil secara maksimal.

5. Apakah Program BPNT juga berhasil untuk mengatasi permasalahan keluarga miskin ?

Jawaban: Berhasil mengatasilah.

6. Apakah Program BPNT juga berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan pangan bagi masyarakat ?

Jawaban: Belum membawa keberhasilan, tapi untuk sejahtera nya memang sudah dapat dikatakan sejahtera.

7. Apakah masyarakat merasa puas dengan adanya Program BPNT ?

Jawaban: Puas sih puas, tapi belum maksimal.

8. Apakah masyarakat setelah menerima Program BPNT kehidupan sehari-hari nya lebih sejahtera ?

Jawaban: Kalau lebih sejahtera iya daripada sebelumnya.

PEDOMAN WAWANCARA
Untuk Penerima Program BPNT (Masyarakat)

Nama : Nur Masitah

Usia : 35 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

a. Strategi Program

1. Bentuk usaha seperti apa yang dilakukan masyarakat untuk terdaftar sebagai penerima BPNT ?

Jawaban: Ya paling hanya memberikan pendataan berupa kartu keluarga,

2. Apakah proses pendataan masyarakat di Kelurahan Glugur Kota sudah terlaksana dengan baik ?

Jawaban: Iya sangat baik.

3. Apakah dengan adanya program BPNT mampu membawa masyarakat lebih sejahtera ?

Jawaban: Iya.

4. Bentuk bantuan seperti apa yang diterima masyarakat dari Program BPNT ?

Jawaban: Beras dan Telur.

5. Berapa besaran bantuan yang diterima masyarakat dari Program BPNT ?

Jawaban: Ya minimal Rp, 110.000

6. Berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan bantuan dari Program BPNT ?

Jawaban: Sebulan sekali.

7. Apakah masyarakat merasa terbantu dengan adanya Program BPNT ?

Jawaban: Ya sangat terbantulah.

8. Apakah pelaksanaan Program BPNT dalam kurun waktu 1 Tahun diadakan di satu kelurahan saja atau diadakan di beberapa kelurahan ?

Jawaban: Ya kalau bisa diadakan disemua kelurahan.

b. Ketepatan Sasaran.

1. Kriteria masyarakat yang seperti apa dalam menerima Program BPNT ?

Jawaban: Menurut saya kriteria yang pas adalah yang tanggungan jumlah anaknya banyak, wanita-wanita status janda.

2. Apakah ada kendala yang dihadapi masyarakat dalam proses sasaran Program BPNT ?

Jawaban: Untuk saat ini ada. Karena untuk bulan ini masih belum mendapatkan beras nya.

3. Apa maksud dari Program BPNT diberikan kepada masyarakat ?

Jawaban: Ya untuk membantu masyarakat.

4. Sebelum adanya Program BPNT terlaksana, apakah masyarakat sudah disurvei oleh tim pendamping ?

Jawaban: Sudah, Sudah ada.

5. Sasaran seperti apa yang diharapkan dari Program BPNT ?

Jawaban: Sasaran nya yaitu untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Dan untuk meringankan beban kehidupannya.

6. Wirausaha apa yang dikembangkan masyarakat melalui penyaluran Program BPNT ?

Jawaban: Saya rasa tidak ada ya.

7. Tingkat keberhasilan yang bagaimana didapatkan masyarakat dari penerimaan Program BPNT ?

Jawaban: Ya sangat memuaskan dan juga bisa membantu kebutuhan pangan untuk anak-anak.

8. Apakah pendataan masyarakat penerima BPNT sudah secara menyeluruh dan merata di Lingkungan Kelurahan Glugur Kota ?

Jawaban: Ya dibidang merata sih ya merata, cuman ada sebagian yang belum mendapatkan bantuannya padahal sudah terdata.

c. Ketepatan Waktu

1. Apakah Program BPNT sudah sesuai dengan prosedurnya ?

Jawaban: Sudah.

2. Apakah waktu pendistribusian BPNT sudah berjalan menurut jadwal yang diperkirakan ?

Jawaban: Selama ini ya sudah.

3. Apakah ada kendala dalam pendistribusian BPNT ?

Jawaban: Ya kendalanya pasti ada ya, Cuman ya hanya bisa dimaklumi.

4. Upaya apa yang dilakukan masyarakat jika terjadi keterlambatan penyaluran Program BPNT ?

Jawaban: Ya hanya menunggu.

5. Dalam waktu 1 tahun, berapa bulan sekali masyarakat mendapatkan Program BPNT ?

Jawaban: Tiap bulan kami mendapatkan nya.

6. Apakah dengan adanya pelaksanaan Program BPNT dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat untuk melakukan pengembangan usaha ?

Jawaban: Ya dengan mendapatkan beras, menurut saya tidak cukup untuk dimanfaatkan sebagai mengembangkan usahanya.

7. Bagaimana tingkat perkembangan usaha masyarakat setelah menerima Program BPNT ?

Jawaban: Tidak ada perkembangan, hanya begitu-begitu saja.

8. Bagaimana pengaruh Program BPNT terhadap masyarakat miskin yang tidak memiliki usaha ?

Jawaban: Pengaruhnya menurut saya sangat membantu ya.

d. Tingkat Pendapatan

1. Apakah dengan adanya Program BPNT dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat ?

Jawaban: Ya bisa dikatakan mengurangi beban dan membantu

2. Apakah dengan adanya Program BPNT dapat mempengaruhi tingkat pendapatan/penghasilan masyarakat ?

Jawaban: Ya pengaruhnya tetap, tidak begitu meningkat.

3. Apakah pelaksanaan Program BPNT di masyarakat Kelurahan Glugur Kota dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi keluarga ?

Jawaban: Ya dapat meningkatkan ekonomi keluarga.

4. Apakah dengan adanya Program BPNT dapat mengatasi pengeluaran beban kehidupan rumah tangga khususnya dalam biaya pendidikan anak-anak ?

Jawaban: Ya sangat mengatasi.

5. Bentuk beban rumah tangga seperti apa yang paling sangat dirasakan dalam kehidupan ?

Jawaban: Ya biaya anak sekolah, uang sekolah dan uang bukunya terlalu mahal. Itulah beban yang sangat dirasakan.

6. Bentuk pertumbuhan ekonomi yang bagaimana dapat dilihat pada masyarakat di Kelurahan Glugur Kota dari bantuan Program BPNT ?

Jawaban: Sepertinya tidak ada pertumbuhan ekonominya. Biasa-biasa saja.

7. Apakah setelah menerima Program BPNT, kemajuan kehidupan rumah tangga lebih membaik ?

Jawaban: Ya dibilang membaik sih enggak juga, tapi ya lumayanlah ada masukannya untuk memberi bantuan untuk biaya anak sekolah, dan ada kemajuannya sedikitlah.

8. Apakah masyarakat menginginkan bantuan Program lain selain dari Program BPNT dalam melakukan pengembangan usaha ?

Jawaban: Boleh dan sangat menginginkan.

e. Ketahanan Pangan.

1. Apakah dengan Program BPNT, masyarakat sudah mengenal hidup sehat ?

Jawaban: Belum mengenal.

2. Apakah Program BPNT dapat memberikan stabilitas gizi kepada masyarakat ?

Jawaban: Ya kalau dapat seperti beras bisa dikatakan memberi stabilitas gizi, cuman kalau yang lain-lain belum tau.

3. Apakah tujuan BPNT sudah berhasil dalam melaksanakan meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat ?

Jawaban: Ya menurut saya berhasil sih, cuman ya kalau bisa mendapatkan tambahan yang lebih besar lagi.

4. Apakah manfaat Program BPNT sudah berhasil dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat ?

Jawaban: Sangat berhasil.

5. Apakah Program BPNT juga berhasil untuk mengatasi permasalahan keluarga miskin ?

Jawaban: Ya harus lah bisa mengatasi, karena itulah harapan dari keluarga miskin.

6. Apakah Program BPNT juga berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan pangan bagi masyarakat ?

Jawaban: Ya dibidang berhasil sih belum begitu meningkat ya.

7. Apakah masyarakat merasa puas dengan adanya Program BPNT ?

Jawaban: Ya puas.

8. Apakah masyarakat setelah menerima Program BPNT kehidupan sehari-hari nya lebih sejahtera ?

Jawaban: Ya sejahtera, karena telah mendapatkan bantuan seperti BPNT.

PEDOMAN WAWANCARA
Untuk Penerima Program BPNT (Masyarakat)

Nama : Nur'aini
Usia : 45 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan

a. Strategi Program

1. Bentuk usaha seperti apa yang dilakukan masyarakat untuk terdaftar sebagai penerima BPNT ?

Jawaban: Pemberian data kepada petugas.

2. Apakah proses pendataan masyarakat di Kelurahan Glugur Kota sudah terlaksana dengan baik ?

Jawaban: Terlaksana dengan baik.

3. Apakah dengan adanya program BPNT mampu membawa masyarakat lebih sejahtera ?

Jawaban: Ya sangat terbantu untuk rakyat susah dan membawa sejahtera.

4. Bentuk bantuan seperti apa yang diterima masyarakat dari Program BPNT ?

Jawaban: Beras dan Telur.

5. Berapa besaran bantuan yang diterima masyarakat dari Program BPNT ?

Jawaban: Saya tidak tau berapa besaran nya. Paling ya mendapatkan beras 9kg, juga pernah dapat 8kg. Kalau dapat beras 8kg, kadang dapat telur nya 20 butir, kalau berasnya 9kg dapat telurnya 10 butir.

6. Berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan bantuan dari Program BPNT ?

Jawaban: Kalau bisa jangka waktunya ya diperpanjang, cuman untuk jangka waktu mendapatkan bantuan nya ya sebulan sekali.

7. Apakah masyarakat merasa terbantu dengan adanya Program BPNT ?

Jawaban: Terbantu.

8. Apakah pelaksanaan Program BPNT dalam kurun waktu 1 Tahun diadakan di satu kelurahan saja atau diadakan di beberapa kelurahan ?

Jawaban: Ya dimana-mana ada, untuk medan barat sepertinya merata dibeberapa kelurahan.

b. Ketepatan Sasaran

1. Kriteria masyarakat yang seperti apa dalam menerima Program BPNT ?

Jawaban: Ya seperti suaminya yang pekerjaannya tidak tetap.

2. Apakah ada kendala yang dihadapi masyarakat dalam proses sasaran Program BPNT ?

Jawaban: Sepertinya tidak ada.

3. Apa maksud dari Program BPNT diberikan kepada masyarakat ?

Jawaban: Ya untuk menghilangkan beban masyarakat lah.

4. Sebelum adanya Program BPNT terlaksana, apakah masyarakat sudah disurvei oleh tim pendamping ?

Jawaban: Iya sudah di survey.

5. Sasaran seperti apa yang diharapkan dari Program BPNT ?

Jawaban: Ya bagi keluarga yang tidak mampu lah dan yang banyak anaknya.

6. Wirausaha apa yang dikembangkan masyarakat melalui penyaluran Program BPNT ?

Jawaban: Kalau menurut ibu, tidak ada ya, cuman kalau yang lain saya tidak tau juga ya.

7. Tingkat keberhasilan yang bagaimana didapatkan masyarakat dari penerimaan Program BPNT ?

Jawaban: Ya bagus, lumayan untuk kebutuhan sehari-hari.

8. Apakah pendataan masyarakat penerima BPNT sudah secara menyeluruh dan merata di Lingkungan Kelurahan Glugur Kota ?

Jawaban: Ya merata.

c. Ketepatan Waktu

1. Apakah Program BPNT sudah sesuai dengan prosedurnya ?

Jawaban: Sudah.

2. Apakah waktu pendistribusian BPNT sudah berjalan menurut jadwal yang diperkirakan ?

Jawaban: Ya sesuai.

3. Apakah ada kendala dalam pendistribusian BPNT ?

Jawaban: Kayaknya tidak ada lah.

4. Upaya apa yang dilakukan masyarakat jika terjadi keterlambatan penyaluran Program BPNT ?

Jawaban: Ya menyampaikan kepada petugas, agar penyaluran nya di percepat.

5. Dalam waktu 1 tahun, berapa bulan sekali masyarakat mendapatkan Program BPNT ?

Jawaban: Kadang per bulan, kadang 3 bulan sekali.

6. Apakah dengan adanya pelaksanaan Program BPNT dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat untuk melakukan pengembangan usaha ?

Jawaban: Ya dimanfaatkan untuk makan tiap hari saja. Untuk pengembangan usaha tidak.

7. Bagaimana tingkat perkembangan usaha masyarakat setelah menerima Program BPNT ?

Jawaban: Tidak ada.

8. Bagaimana pengaruh Program BPNT terhadap masyarakat miskin yang tidak memiliki usaha ?

Jawaban: Pengaruhnya seperti yang saya rasakan, sedikit tertutupi segala kekurangan keluarga saya.

d. Tingkat Pendapatan

1. Apakah dengan adanya Program BPNT dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat ?

Jawaban: Ya mengurangi.

2. Apakah dengan adanya Program BPNT dapat mempengaruhi tingkat pendapatan/penghasilan masyarakat ?

Jawaban: Bagi saya biasa-biasa saja.

3. Apakah pelaksanaan Program BPNT di masyarakat Kelurahan Glugur Kota dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi keluarga ?

Jawaban: Ya bisa.

4. Apakah dengan adanya Program BPNT dapat mengatasi pengeluaran beban kehidupan rumah tangga khususnya dalam biaya pendidikan anak-anak ?

Jawaban: Bisa.

5. Bentuk beban rumah tangga seperti apa yang paling sangat dirasakan dalam kehidupan ?

Jawaban: Ya dalam bentuk keuangan lah. Biaya pendidikan anak-anak.

6. Bentuk pertumbuhan ekonomi yang bagaimana dapat dilihat pada masyarakat di Kelurahan Glugur Kota dari bantuan Program BPNT ?

Jawaban: Ada.

7. Apakah setelah menerima Program BPNT, kemajuan kehidupan rumah tangga lebih membaik ?

Jawaban: Ya lebih membaik.

8. Apakah masyarakat menginginkan bantuan Program lain selain dari Program BPNT dalam melakukan pengembangan usaha ?

Jawaban: Iya menginginkan.

e. Ketahanan Pangan

1. Apakah dengan Program BPNT, masyarakat sudah mengenal hidup sehat ?

Jawaban: Sepertinya kurang sih.

2. Apakah Program BPNT dapat memberikan stabilitas gizi kepada masyarakat ?

Jawaban: Ya kalau bisa ya dapat memberikan.

3. Apakah tujuan BPNT sudah berhasil dalam melaksanakan meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat ?

Jawaban: Sudah.

4. Apakah manfaat Program BPNT sudah berhasil dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat ?

Jawaban: Sudah berhasil.

5. Apakah Program BPNT juga berhasil untuk mengatasi permasalahan keluarga miskin ?

Jawaban: Dapat mengatasi.

6. Apakah Program BPNT juga berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan pangan bagi masyarakat ?

Jawaban: Ya berhasil.

7. Apakah masyarakat merasa puas dengan adanya Program BPNT ?

Jawaban: Puas.

8. Apakah masyarakat setelah menerima Program BPNT kehidupan sehari-hari nya lebih sejahtera ?

Jawaban: Ya betul, membawa sejahtera.

PEDOMAN WAWANCARA
Untuk Penerima Program BPNT (Masyarakat)

Nama : Veni Ivanty

Usia : 36 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

a. Strategi Program

1. Bentuk usaha seperti apa yang dilakukan masyarakat untuk terdaftar sebagai penerima BPNT ?

Jawaban: Memberikan data berupa kartu keluarga, dan di wawancarain oleh petugas pada tahun 2015.

2. Apakah proses pendataan masyarakat di Kelurahan Glugur Kota sudah terlaksana dengan baik ?

Jawaban: Baik.

3. Apakah dengan adanya program BPNT mampu membawa masyarakat lebih sejahtera ?

Jawaban: Iya lebih sejahtera, sudah begitu juga mampu tertolong.

4. Bentuk bantuan seperti apa yang diterima masyarakat dari Program BPNT ?

Jawaban: Dari PKH ya berupa uang per tiga bulan sekali, kalau dari BPNT nya mendapatkan beras setiap bulan sekali.

5. Berapa besaran bantuan yang diterima masyarakat dari Program BPNT ?

Jawaban: Kalau dibentuk uang ya sebesar Rp. 110.000

6. Berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan bantuan dari Program BPNT ?

Jawaban: Kalau bisa selamanya.

7. Apakah masyarakat merasa terbantu dengan adanya Program BPNT ?

Jawaban: Merasa terbantu.

8. Apakah pelaksanaan Program BPNT dalam kurun waktu 1 Tahun diadakan di satu kelurahan saja atau diadakan di beberapa kelurahan ?

Jawaban: Untuk saat ini diadakan di beberapa kelurahan.

b. Ketepatan Sasaran

1. Kriteria masyarakat yang seperti apa dalam menerima Program BPNT ?

Jawaban: Yang tanggungan anak banyak.

2. Apakah ada kendala yang dihadapi masyarakat dalam proses sasaran Program BPNT ?

Jawaban: Tidak ada kendala.

3. Apa maksud dari Program BPNT diberikan kepada masyarakat ?

Jawaban: Untuk membantu kehidupan, terutama untuk kehidupan anak-anak sekolah.

4. Sebelum adanya Program BPNT terlaksana, apakah masyarakat sudah disurvey oleh tim pendamping ?

Jawaban: Sudah di survey, kalau saya sendiri sudah di survey sejak tahun 2015. Pertama mendapatkan bantuannya pada tahun 2018 kemarin di bulan lima.

5. Sasaran seperti apa yang diharapkan dari Program BPNT ?

Jawaban: Sepengetahuan saya anak sekolah ya. Tapi dari BPNT nya kalau bisa beras nya ya dapat disalurkan dengan baik untuk membantu masyarakat.

6. Wirausaha apa yang dikembangkan masyarakat melalui penyaluran Program BPNT ?

Jawaban: Ya kalau bisa masyarakat membuka wirausaha kecil-kecilan seperti warung jajanan anak-anak.

7. Tingkat keberhasilan yang bagaimana didapatkan masyarakat dari penerimaan Program BPNT ?

Jawaban: Kita merasa terbantu untuk keluarga kalangan menengah kebawah. Untuk biaya anak sekolah pun tetap terjaga.

8. Apakah pendataan masyarakat penerima BPNT sudah secara menyeluruh dan merata di Lingkungan Kelurahan Glugur Kota ?

Jawaban: Ada yang dapat dan ada juga yang tidak dapat. Belum merata juga.

c. Ketepatan Waktu

1. Apakah Program BPNT sudah sesuai dengan prosedurnya ?

Jawaban: Sudah sesuai.

2. Apakah waktu pendistribusian BPNT sudah berjalan menurut jadwal yang diperkirakan ?

Jawaban: Sudah.

3. Apakah ada kendala dalam pendistribusian BPNT ?

Jawaban: Tidak ada kendala.

4. Upaya apa yang dilakukan masyarakat jika terjadi keterlambatan penyaluran Program BPNT ?

Jawaban: Ya kami hanya bisa menunggu, karena kan program ini ditetapkan dari pemerintah. Ya paling mendapatkan kabar dari petugas BPNT nya.

5. Dalam waktu 1 tahun, berapa bulan sekali masyarakat mendapatkan Program BPNT ?

Jawaban: Ya hampir setiap bulannya.

6. Apakah dengan adanya pelaksanaan Program BPNT dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat untuk melakukan pengembangan usaha ?

Jawaban: Dapat.

7. Bagaimana tingkat perkembangan usaha masyarakat setelah menerima Program BPNT ?

Jawaban: Untuk tingkat perkembangannya seperti biasa-biasa saja.

8. Bagaimana pengaruh Program BPNT terhadap masyarakat miskin yang tidak memiliki usaha ?

Jawaban: Menurut saya merasa terbantu.

d. Tingkat Pendapatan

1. Apakah dengan adanya Program BPNT dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat ?

Jawaban: Dapat. Ya berkurang lah beban masyarakat menengah kebawah dengan adanya BPNT ini.

2. Apakah dengan adanya Program BPNT dapat mempengaruhi tingkat pendapatan/penghasilan masyarakat ?

Jawaban: Untuk mempengaruhi bisa dikatakan tidak ada.

3. Apakah pelaksanaan Program BPNT di masyarakat Kelurahan Glugur Kota dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi keluarga ?

Jawaban: Dapat meningkatkan.

4. Apakah dengan adanya Program BPNT dapat mengatasi pengeluaran beban kehidupan rumah tangga khususnya dalam biaya pendidikan anak-anak ?

Jawaban: Dapat mengatasi.

5. Bentuk beban rumah tangga seperti apa yang paling sangat dirasakan dalam kehidupan ?

Jawaban: Masalah sandang dan pangan.

6. Bentuk pertumbuhan ekonomi yang bagaimana dapat dilihat pada masyarakat di Kelurahan Glugur Kota dari bantuan Program BPNT ?

Jawaban: Tidak ada ya, karena memang tidak terlihat.

7. Apakah setelah menerima Program BPNT, kemajuan kehidupan rumah tangga lebih membaik ?

Jawaban: Iya lebih membaik bahkan sangat menolong.

8. Apakah masyarakat menginginkan bantuan Program lain selain dari Program BPNT dalam melakukan pengembangan usaha ?

Jawaban: Ya kalau program lain kalau bisa lebih terfokuskan kepada biaya pendidikan anak sekolah saja.

e. Ketahanan Pangan

1. Apakah dengan Program BPNT, masyarakat sudah mengenal hidup sehat ?

Jawaban: Sebagian ada yang mengenal dan sebagian ada juga yang tidak mengenal.

2. Apakah Program BPNT dapat memberikan stabilitas gizi kepada masyarakat ?

Jawaban: Dapat memberikan stabilitas gizi. Karena kalau dari tahun-tahun sebelumnya kami mendapatkan kualitas beras yang kurang terbaik. Tapi pada tahun ini kami juga mendapatkan beras yang kualitas nya terbaik.

3. Apakah tujuan BPNT sudah berhasil dalam melaksanakan meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat ?

Jawaban: Sudah.

4. Apakah manfaat Program BPNT sudah berhasil dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat ?

Jawaban: Sudah berhasil juga.

5. Apakah Program BPNT juga berhasil untuk mengatasi permasalahan keluarga miskin ?

Jawaban: Menurut saya juga berhasil dalam mengatasi keluarga miskin.

6. Apakah Program BPNT juga berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan pangan bagi masyarakat ?

Jawaban: Berhasil.

7. Apakah masyarakat merasa puas dengan adanya Program BPNT ?

Jawaban: Kalau dari saya sendiri merasakan nya merasa puas.

8. Apakah masyarakat setelah menerima Program BPNT kehidupan sehari-hari nya lebih sejahtera ?

Jawaban: Sejahtera.

PEDOMAN WAWANCARA
Untuk : Pendamping Program BPNT

Nama : Budiono SH
Pekerjaan : Relawan Sosial
Jabatan : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

a. Strategi Program

1. Bagaimanakah peran pendamping dalam melaksanakan Program BPNT agar dapat berjalan dengan baik di masyarakat ?

Jawaban : Peran pendamping adalah mengawasi dan memberikan arahan kepada masyarakat agar bantuan BPNT tersalurkan dengan baik kepada masyarakat.

2. Usaha seperti apa yang dilakukan Pendamping BPNT agar dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat ?

Jawaban : Usaha yang kami lakukan ialah melakukan pendataan masyarakat, mengawasi serta mengontrol aktivitas program BPNT.

3. Sudah berapa lama Program BPNT berlangsung di Kelurahan Glugur Kota ?

Jawaban : Sejak tahun 2017.

4. Apakah Program BPNT yang telah terlaksana, sudah tersalurkan dengan baik kepada masyarakat ?

Jawaban : Sudah tersalurkan dengan baik.

5. Apa saja kendala yang dihadapi Petugas Pendamping dalam menjalankan pelaksanaan Program BPNT di Kelurahan Glugur Kota ?

Jawaban : Kendala di Lapangan tidak ada.

6. Bagaimana konsep Program BPNT ?

Jawaban : Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Mutu.

7. Apakah teknis pelaksanaan BPNT sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku ?

Jawaban : Sudah.

8. Apakah ada program bantuan lainnya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Medan selain dari Program BPNT ?

Jawaban : Ada.

b. Ketepatan Sasaran

1. Apakah Program BPNT sudah tepat sasaran ?

Jawaban : Sudah

2. Bagaimana cara Petugas Pendamping untuk menentukan kriteria masyarakat yang berhak menerima Program BPNT ?

Jawaban : Melakukan Survey secara fisik, dengan kita datang secara langsung kerumah warga dan memfotokan bentuk rumahnya, baik foto bagian dalam rumah maupun bagian luar rumah.

3. Target sasaran masyarakat yang seperti apa untuk dijadikan prioritas penerima Program BPNT ?

Jawaban : Kriteria nya ialah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

4. Persyaratan yang seperti apa dilakukan masyarakat agar terdaftar sebagai penerima Program BPNT ?

Jawaban : Masyarakat harus memberikan surat-surat berupa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan, Fotokopi Kartu Keluarga, dan KTP. Untuk di verifikasi secara fisik.

5. Apakah ada pengaduan masyarakat kepada Petugas Pendamping terkait penerima BPNT yang tidak tepat sasaran ?

Jawaban : Ada.

6. Upaya apa yang dilakukan Petugas Pendamping apabila menemukan ketidaktepatan sasaran bantuan ?

Jawaban : Yang dilakukan dengan cara melaporkan ke pemerintah terdekat semisalnya Kepala Lingkungan dan Lurah setempat.

7. Apakah pendataan masyarakat penerima BPNT sudah secara menyeluruh dan merata di Lingkungan Kelurahan Glugur Kota ?

Jawaban : Sudah menyeluruh dan merata.

8. Apa tindakan Petugas Pendamping apabila sasaran tidak tercapai ?

Jawaban : Melaporkan KPM kepada Dinas Sosial Kota Medan.

c. Ketepatan Waktu

1. Apakah Program BPNT sudah berjalan tepat waktu ?

Jawaban : Untuk saat ini berjalan tepat waktu.

2. Apakah waktu pendistribusian BPNT sudah berjalan dengan semestinya ?

Jawaban : Sudah.

3. Dalam kurun waktu 1 Tahun, berapa bulan sekali masyarakat mendapatkan Program BPNT ?

Jawaban : Setiap bulan.

4. Apakah dalam proses pendistribusian BPNT pernah mengalami keterlambatan ?

Jawaban : Tidak pernah ada keterlambatan.

5. Upaya apa yang dilakukan Petugas Pendamping jika terjadi keterlambatan pendistribusian Program BPNT ?

Jawaban : Selama pelaksanaan dari tahun 2017 hingga saat ini tidak ada keterlambatan.

Usaha yang kami lakukan hanya sebagai pendataan, pengawasan dan pengontrolan. Karena bantuan BPNT disalurkan berdasarkan saldo dari pusat.

6. Apakah Program BPNT tersebut dapat benar-benar dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan usahanya ?

Jawaban : Tidak ada ya, karena penyaluran bantuan BPNT berupa beras dan telur saja hanya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan saja. Terkecuali masyarakat menerima bantuan modal untuk mengembangkan usahanya, kemungkinan dapat dimanfaatkan.

7. Tingkat perkembangan usaha masyarakat seperti apa yang dapat dilihat setelah menerima Program BPNT ?

Jawaban : Tidak terlihat.

8. Bagaimanakah tingkat kepuasan Petugas Pendamping jika proses pendistribusian tepat waktu ?

Jawaban : Merasa senang.

d. Tingkat Pendapatan

1. Apakah pelaksanaan Program BPNT sudah sesuai dengan tujuan program ?

Jawaban : Sudah sesuai.

2. Apakah pelaksanaan Program BPNT dapat mempengaruhi beban pengeluaran masyarakat ?

Jawaban : Dapat.

3. Apakah program BPNT dapat mengatasi beban pengeluaran masyarakat ?

Jawaban : Dapat.

4. Apakah dengan adanya Program BPNT di Kelurahan Glugur Kota dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi keluarga ?

Jawaban : Dapat.

5. Apakah dengan adanya Program BPNT dapat mengurangi beban kehidupan masyarakat ?

Jawaban : Dapat

6. Dalam bentuk apa beban kehidupan keluarga yang sangat dirasakan oleh masyarakat ?

Jawaban : Informasi yang didapat berupa harga kebutuhan dasar pokok yang tidak stabil, seperti harga kebutuhan pangan.

7. Apakah setelah menerima Program BPNT kemajuan kehidupan masyarakat lebih membaik ?

Jawaban : Ya lebih membaik.

8. Apakah masyarakat menginginkan bantuan melalui program selain BPNT dalam meningkatkan kesejahteraan pendapatan ?

Jawaban : Ya sangat menginginkan.

e. Ketahanan Pangan

1. Apakah dengan Program BPNT, masyarakat sudah mengenal hidup sehat ?

Jawaban : Saya rasa belum.

2. Apakah Program BPNT dapat memberikan stabilitas gizi kepada masyarakat?

Jawaban : Ya sudah dapat memberikan.

3. Apakah tujuan BPNT sudah berhasil dalam melaksanakan meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat ?

Jawaban : Ya bisa meningkatkan, tapi paling utama kalau menurut saya untuk mengurangi beban masyarakat.

4. Apakah manfaat Program BPNT sudah berhasil dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat ?

Jawaban : Iya sudah berhasil.

5. Apakah Program BPNT juga berhasil untuk mengatasi permasalahan keluarga miskin ?

Jawaban : Ya berhasil dan mengatasi.

6. Apakah Program BPNT juga berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan pangan bagi masyarakat ?

Jawaban : Tergantung masyarakatnya dalam mengelola kebutuhan pangan nya.

7. Apakah masyarakat merasa puas dengan adanya Program BPNT ?

Jawaban : Merasa puas pastinya.

8. Apakah masyarakat setelah menerima Program BPNT kehidupan sehari-hari nya lebih sejahtera ?

Jawaban : Ya lebih sejahtera.